



Women's World Banking

# PEREMPUAN SEBAGAI UJUNG TOMBAK KEUANGAN: INKLUSI KEUANGAN UNTUK PERDESAAN YANG KURANG TERLAYANI DAN BELUM TERLAYANI DI INDONESIA



Agnes Salyanty

April 2024

“

**Because there's nothing micro  
about a billion women. ”**

**Mary Ellen Iskenderian**

---

Author, Advocate, President and  
CEO of Women's World Banking

# Ucapan Terima Kasih

Women's World Banking pertama-tama dan terutama berterima kasih kepada para perempuan yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pengumpulan data penelitian ini yang beberapa di antaranya menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbagi rumah dan kehidupan mereka dengan kami.



Tanpa mereka, pemahaman dalam laporan ini tidak akan mungkin terwujud. Para penulis mengucapkan terima kasih kepada Dewa Ayu Laksmi, Asisten Deputi PUG Bidang Perekonomian di Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan, Arinengwang Gusta Galung Raharjo, dan Puji Iman Siagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Andi Setianto dari Bank Negara Indonesia, Fajri, dan Dani Wildan dari Bank Rakyat Indonesia, Eva Medianti dan Stuart J. Campbell dari Rare.org, yang telah bermurah hati untuk menyediakan waktu, memberikan wawasan dan merujuk kami kepada sumber informasi dan jaringan yang membantu dalam pengembangan dan validasi temuan kami.

Laporan ini disusun oleh Agnes Salyanty dan Media Wahyudi Askar. Pengumpulan data dilakukan oleh Astri Sri Sulastri, Tira Maya Maisesa, Rahmi Datu

Yunaningsih, Elisabeth Nurani, Arini Diah Pramesti, dan tim RISE. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim iMiTYWORKS, Perplum Press, Meity Kusumaningrum, Maria Serenade Sinurat, dan Leonardi yang telah menyelesaikan rancangan laporan ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan rekan-rekan Women's World Banking Christina Maynes, Elwyn Panggabean, Vitasari Anggraeni, Ker Thao, Sonja Kelly, Martha Hindriyani, Megan Dwyer Baumann, dan pihak lain yang telah memberikan masukan berharga selama berlangsungnya proses tersebut.

Publikasi ini terwujud berkat Bill & Melinda Gates Foundation sebagai bagian dari dukungannya terhadap upaya Women's World Banking untuk memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia melalui inklusi keuangan.

# Ringkasan Eksekutif

Studi ini menyoroti perlunya upaya kolaboratif yang bertujuan untuk mendorong inklusi keuangan di daerah perdesaan di seluruh Indonesia.

Laporan komprehensif ini mengungkap temuan penelitian yang menyoroti tantangan rumit yang dihadapi oleh perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani, yang mencakup isu-isu seperti keterbatasan akses terhadap layanan keuangan, kendala mobilitas, akses internet yang tidak memadai, dan tantangan dalam adopsi digital.

Dengan menggunakan pendekatan campuran deduktif-induktif dan memanfaatkan berbagai sumber data, termasuk wawancara dengan para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi, studi ini menarik kesimpulan berikut tentang kebutuhan dan preferensi keuangan perempuan di daerah perdesaan di Indonesia.

 Analisis spasial yang dilakukan terhadap desa-desa yang kurang terlayani kendati memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi, menunjukkan kehadiran titik-titik layanan keuangan. Namun, masih terdapat kesenjangan yang signifikan dalam layanan yang ditawarkan sehingga memperbesar kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan. Di kawasan Indonesia Timur, 67% penduduknya tinggal di perdesaan dan belum terlayani.

 Perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani memanfaatkan strategi pengelolaan keuangan yang kreatif di tengah keterbatasan aksesibilitas layanan keuangan dan risiko iklim. Perempuan mendiversifikasi pendapatan mereka, menggunakan berbagai saluran simpan pinjam, mengasuransikan risiko dengan berbagai cara, mengatur pengiriman dan penerimaan kiriman uang, dan memanfaatkan modal sosial. Misalnya, pendapatan seorang perempuan berasal dari dua sumber: budidaya udang dan budidaya bandeng, dengan jadwal panen yang berbeda dan strategi yang berbeda (termasuk pinjaman dan pra-penjualan hasil panennya) untuk mengelola tabungannya di bulan-bulan paceklik.



 Mobilitas, akses internet, dan adopsi digital masih menjadi tantangan dalam menggunakan layanan dan produk keuangan formal. Terdapat korelasi yang tinggi antara wilayah perdesaan yang memiliki koneksi internet yang konsisten dan andal serta penerapan kode QR, namun internet yang andal belum merambah seluruh wilayah perdesaan.

 Terdapat korelasi yang kuat dan signifikan secara statistik antara perempuan dalam kepemimpinan politik dan akses keuangan bagi laki-laki dan perempuan: Women's World Banking menemukan hubungan positif yang signifikan secara statistik antara desa dengan pemimpin perempuan dan jumlah agen bank.

Berdasarkan wawasan ini, dan dengan masukan dari para pembuat kebijakan dan penyedia layanan, laporan ini mengusulkan serangkaian strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan bagi perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani. Strategi-strategi ini mencakup perluasan produk dan layanan keuangan, peningkatan infrastruktur, memperlengkapi agen bank untuk menjalankan berbagai peran mereka, dan membangun kemitraan kolaboratif di antara berbagai pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, tujuan kami adalah merumuskan pendekatan berbasis hasil yang efisien dan berfokus pada kebutuhan perempuan di daerah perdesaan, untuk membantu memastikan keamanan dan kesejahteraan rumah tangga perempuan dengan tetap memperhatikan tantangan yang mereka hadapi.



# Daftar Isi

---

- 03 | **Ucapan Terima Kasih**
- 04 | **Ringkasan Eksekutif**
- 05 | **Daftar Isi**
- 07 | **Pendahuluan**
- 10 | **Temuan Penelitian**
  - 11 | **Disparitas Spasial: Mengungkap Kesenjangan Layanan Keuangan di Desa-Desa yang Kurang Terlayani dengan Aktivitas Ekonomi yang Tinggi**
  - 16 | **Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani Memanfaatkan Strategi Pengelolaan Keuangan yang Kreatif di Tengah Keterbatasan Aksesibilitas Layanan Keuangan dan Risiko Iklim**
  - 26 | **Mobilitas, Akses Internet, dan Adopsi Digital Masih Menjadi Tantangan dalam Penggunaan Layanan dan Produk Keuangan Formal**
- 33 | **Rekomendasi**
  - 33 | **Memperkuat Faktor Penggerak melalui Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan**
  - 36 | **Memperluas Desain Produk dan Layanan yang Sesuai untuk Perempuan dan Masyarakat Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani**
  - 40 | **Memanfaatkan Para Pemimpin Perempuan dan Generasi Muda sebagai Bagian dari Inisiatif Inklusi Keuangan Digital di Masyarakat Perdesaan**
- 41 | **Kesimpulan: Melibatkan Perempuan sebagai Ujung Tombak Keuangan di Indonesia**
- 42 | **Referensi**
- 43 | **Lampiran A: Metodologi Penelitian**
- 45 | **Lampiran B: Pendekatan Pengambilan Sampel**
- 46 | **Lampiran C: Mengidentifikasi Indikator untuk Memetakan Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani secara Finansial**
- 48 | **Lampiran D: Gambar Tambahan**

# Daftar Gambar dan Tabel

- 08 | Gambar 1**  
Kategorisasi Wilayah Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani hingga Tingkat Desa
- 12 | Gambar 2**  
Pemetaan Wilayah yang Belum Terlayani dan Kurang Terlayani secara Finansial di Seluruh Indonesia
- 13 | Gambar 3**  
Pertumbuhan Penjangkauan Layanan Perbankan hingga ke Daerah-Daerah antara Tahun 2018 hingga 2022.
- 14 | Gambar 4**  
Perubahan Titik Akses Keuangan di Indonesia, 2018-2022
- 15 | Gambar 5**  
Sekitar Desa Selorejo
- 16 | Gambar 6**  
Karakteristik Desa yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani
- 32 | Gambar 7**  
Bagaimana Perempuan dalam Peran Kepemimpinan Memengaruhi Akses Keuangan di Desa
- 34 | Gambar 8**  
Menghubungkan Titik-Titik: Infrastruktur untuk Layanan Keuangan yang Lebih Baik bagi Konsumen yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani
- 36 | Gambar 8.1**  
Untuk Memperluas Produk dan Layanan yang Dirancang untuk Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani, Pemerintah, Penyedia Layanan Keuangan, dan Pemangku Kepentingan Lainnya Harus Fokus pada Empat Bidang
- 46 | Gambar 9**  
Pilihan Titik Akses Keuangan
- 47 | Gambar 10**  
Distribusi Layanan Pos dan Pembayaran Online PT Pos di Seluruh Indonesia hingga Tahun 2022
- 47 | Gambar 11**  
Sebaran PT Pegadaian yang Melayani Jasa Tabungan dan Gadaai Emas di Indonesia hingga Tahun 2022
- 48 | Gambar 12**  
Perkiraan Biaya Perjalanan ke Lembaga Keuangan Terdekat Tahun 2018-2022
- 49 | Gambar 13**  
Tingkat Kecepatan Akses Internet Periode 2018-2022
- 50 | Gambar 14**  
Usulan Intervensi Kolaboratif di Berbagai Pemangku Kepentingan

# Pendahuluan

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mencapai kemajuan penting dalam mencapai tujuannya yang ambisius yaitu mencapai akses keuangan yang hampir universal pada tahun 2025.

Bank Dunia melaporkan bahwa Indonesia telah menutup kesenjangan gender pada akses rekening, dengan sekitar separuh perempuan dan separuh laki-laki memiliki rekening di sebuah lembaga keuangan.<sup>1</sup> Namun, mengakses layanan keuangan dasar masih menjadi tantangan besar bagi perempuan perdesaan: di wilayah perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani, masyarakat sering kali harus melakukan perjalanan jauh hanya untuk mengakses ATM dan cabang bank. Sekalipun tersedia layanan, nasabah menghadapi antrean panjang, terutama pada hari pembayaran gaji. Logistik yang rumit dapat menimbulkan biaya peluang bagi usaha kecil, karena waktu dan biaya yang dihabiskan untuk melakukan perjalanan dan menunggu di lembaga keuangan dapat digunakan untuk usaha yang lebih produktif. Dengan kata lain, perbedaan karakteristik dan kebutuhan keuangan masyarakat yang kurang terlayani dan yang belum terlayani tidak ditangani secara memadai oleh sistem layanan keuangan yang ada.

Lanskap inklusi keuangan di Indonesia telah berubah secara dramatis selama satu dekade terakhir. Layanan keuangan “untuk daerah terpencil” tidak lagi hanya merupakan institusi fisik dengan lalu lintas pengunjung yang padat. Sebaliknya, perpaduan antara agen multiguna, perangkat teknologi pribadi, dan layanan semiformal seperti kelompok simpan pinjam melayani wilayah perdesaan. Hasil tambal sulam alat dan sumber daya keuangan yang digunakan oleh perempuan bergantung pada alat yang dapat mereka akses dan cara mereka berinovasi dalam membelanjakan, menabung, meminjam, dan membuat perencanaan. Karena perubahan lanskap ini, dan karena kebutuhan unik perempuan di wilayah yang sulit dijangkau, strategi yang digunakan ekosistem jasa keuangan untuk memberikan akses kepada pengguna awal tidak akan mampu menjangkau separuh sisa populasi Indonesia yang masih kekurangan akses (“belum terlayani”) atau gagal menggunakan layanan keuangan (“kurang terlayani”).

## KOTAK 1. Menjangkau Masyarakat Paling Terpencil di Indonesia

### Kepemilikan rekening di Indonesia



dibandingkan rata-rata regional Asia Timur dan Pasifik

Orang dewasa di perdesaan di Indonesia memiliki kemungkinan



untuk memiliki rekening dibandingkan orang dewasa di perkotaan



masyarakat Indonesia tinggal di perdesaan



penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian

Pertanian menyumbang



PDB Indonesia

Terdapat kebutuhan ekonomi dan pemberdayaan yang kuat di Indonesia untuk memastikan serangkaian layanan keuangan menjangkau daerah perdesaan

1. Demirgüç-Kunt et al. (2022). The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the Age of COVID-19. Bank Dunia.

Masyarakat perdesaan memiliki banyak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang penting bagi kesejahteraan ekonomi di Indonesia. Masyarakat perdesaan juga termasuk wilayah pertanian yang penting bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, daerah perdesaan memiliki kebutuhan pembangunan yang tertinggi dan sumber daya paling sedikit yang tersedia.<sup>2</sup> Untuk mencapai tujuan “jangan

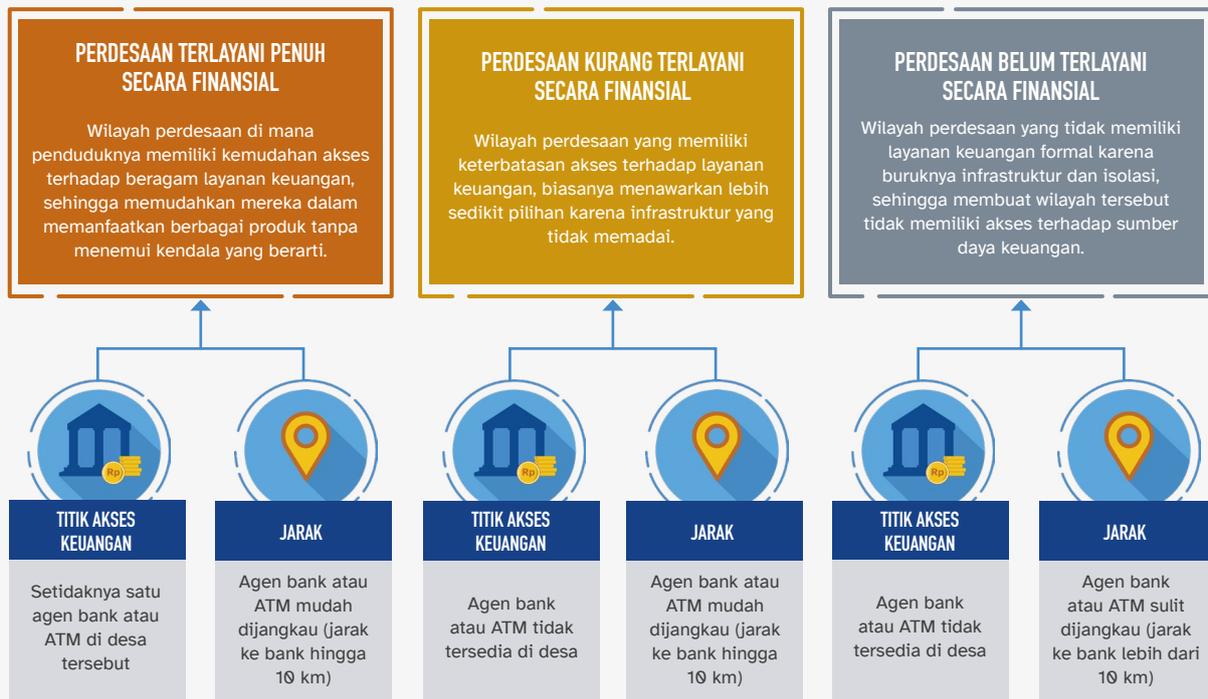
meninggalkan siapa pun,” para pembuat kebijakan dan penyedia layanan tidak boleh mengabaikan kebutuhan masyarakat yang belum terlayani dan kurang terlayani. Penelitian ini menekankan pentingnya meningkatkan akses keuangan dan inklusi kualitas bagi nasabah perdesaan, khususnya perempuan dan anak perempuan demi ketahanan ekonomi jangka panjang mereka.

## KOTAK 2. Pendekatan dan Metodologi Penelitian (lihat Lampiran A)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai secara komprehensif daerah yang kurang terlayani dan belum terlayani di Indonesia melalui kacamata keterlibatan jasa keuangan. Untuk mencapai tujuan ini, kami memetakan lanskap inklusi keuangan di Indonesia saat ini dengan menggunakan data Podes 2022, dan mengeksplorasi bagaimana para pelaku jasa keuangan

dapat secara aktif melibatkan nasabah perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani dengan berbagai layanan keuangan. Hasil dan analisis ini dimaksudkan untuk menghasilkan bukti kuat bagi pembuatan kebijakan dan pengembangan solusi keuangan terkait bagi perempuan yang kurang terlayani dan belum terlayani.

**GAMBAR 1. KATEGORISASI WILAYAH PERDESAAN YANG KURANG TERLAYANI DAN BELUM TERLAYANI HINGGA TINGKAT DESA**



2. Tamilarasu, A. (2014). Role of banking sectors on financial inclusion development in India: An analysis. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 272-276.; Jansson, T. (2001). Microfinance: From village to Wall Street. Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/Microfinance-From-Village-to-Wall-Street.pdf>; Hannig, A., & Jansen, S. (2008). Inclusive financial system reforms: What works, What doesn't, and why? Draft Report. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ); Sarma, M., & Pais, J. (2008). Financial inclusion and development: A cross country analysis. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Kesetaraan, Inklusi dan Pembangunan Manusia, yang diselenggarakan oleh HDCA dan IHD. <https://www.icrier.org/pdf/Mandira%20Sarma-Paper.pdf>



### Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

- 1 Bagaimana distribusi nasabah yang kurang terlayani dan belum terlayani di wilayah perdesaan saat ini, dan bagaimana perkembangan lanskap ini dari waktu ke waktu?
- 2 Bagaimana perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani mengelola kebutuhan keuangan mereka dan melakukan transaksi keuangan?
- 3 Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap dinamika inklusi keuangan yang sedang berlangsung di daerah-daerah yang kurang terlayani dan belum terlayani?
- 4 Bagaimana nasabah perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani dapat mencapai peningkatan akses keuangan dan inklusi yang berkualitas?

Penelitian ini menggunakan metodologi hibrida deduktif-induktif, yang mengintegrasikan tinjauan literatur, wawancara ahli, dan analisis data geospasial menggunakan perangkat lunak ArcGIS dan basis data otoritatif. Pendekatan dua metode ini, yang menggabungkan analisis kualitatif dan

kuantitatif, memastikan pemahaman menyeluruh tentang lanskap keuangan. Ketepatan studi ini ditingkatkan dengan mengkategorikan wilayah menjadi wilayah yang terlayani penuh, kurang terlayani, dan belum terlayani, sehingga meningkatkan akurasi hasil penelitian.

## Temuan Penelitian

Penelitian Women's World Banking mengenai nasabah yang kurang terlayani dan belum terlayani juga terdapat dalam kumpulan literatur para peneliti dan aktivis.<sup>3</sup>



Sama halnya dengan temuan lembaga keuangan lainnya, kami menemukan bahwa kurangnya layanan keuangan tidak berarti kurangnya aktivitas keuangan dan ekonomi: di daerah perdesaan dan terpencil di Indonesia dengan konektivitas dan layanan terbatas, justru terdapat aktivitas ekonomi dan sosial yang signifikan yang memerlukan pengelolaan uang secara aktif, mitigasi risiko, dan pemanfaatan peluang. Selain itu, Women's World Banking telah menemukan serangkaian tantangan dari sisi penawaran dan permintaan yang membatasi perempuan yang kurang terlayani dan belum terlayani untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam layanan keuangan formal. Di sisi penawaran, tantangan operasional, masalah konektivitas, dan buruknya infrastruktur membatasi kemampuan penyedia jasa keuangan untuk terhubung dengan nasabah dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di wilayah dengan kepadatan penduduk lebih tinggi. Di sisi permintaan, meskipun terdapat

kepercayaan yang tinggi terhadap sistem keuangan, perempuan harus berjuang menghadapi mobilitas, keterbatasan waktu, kesadaran, dan kurangnya interoperabilitas antar tawaran layanan yang terbatas. Hal yang sama penting yang tidak kami temukan: yang tidak termasuk dalam daftar tantangan sisi permintaan adalah literasi digital dan akses perangkat teknologi pribadi. Satu dekade yang lalu, hal ini merupakan kendala utama dalam melibatkan perempuan perdesaan; saat ini, perempuan aktif menggunakan ponsel pintar atau tablet namun tidak menggunakan layanan keuangan formal melalui perangkat digital mereka. Di bagian ini, kami akan membahas tantangan-tantangan tersebut, pertama dengan memberikan gambaran tentang nasabah perempuan dan desa tempat tinggal mereka, kemudian mengartikulasikan faktor-faktor yang menghalangi perempuan yang berada di ujung jangkauan layanan keuangan dari keterlibatan jasa keuangan formal yang berarti.

3. IDEO (2022). Faster product-market fit for digital finance at the last mile. <https://www.financialconfidence.design/last-mile-user>; The Financial Agency of Indonesian Women. (2021). Last mile money. <https://www.womenandmoney.design/>; PwC Indonesia. (2019). Indonesia's fintech lending: Driving economic growth through financial inclusion. [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf)

## Disparitas Spasial: Mengungkap Kesenjangan Layanan Keuangan di Desa-Desa yang Kurang Terlayani dengan Aktivitas Ekonomi yang Tinggi



Secara nasional, terdapat 75 kantor cabang bank per 1.000 penduduk, enam kantor pos milik pemerintah (PT Pos) yang menawarkan layanan pembayaran online per 100.000 penduduk, dan dua kantor cabang Pegadaian per 100.000 penduduk yang menawarkan layanan tabungan dan penggadaian emas. Jika dilihat secara regional, data menunjukkan peningkatan konsentrasi titik akses keuangan di wilayah ibu kota. Sementara itu, pada tahun 2018 hingga 2022<sup>4</sup>, wilayah yang kurang terlayani dan belum terlayani mengalami rasio kepadatan layanan yang lebih rendah: di wilayah tersebut, sekitar 52% desa di Indonesia memiliki agen bank, dan 16% desa memiliki ATM di dekatnya. Namun, ATM jauh lebih terkonsentrasi (85%) di wilayah yang terlayani lengkap secara finansial.

Yang menjadi masalah adalah wilayah yang belum terlayani mengalami perlambatan pertumbuhan agen bank dan ATM selama beberapa tahun terakhir, masing-masing sekitar 48% dan 14% (Gambar 4). Salah satu potensi alasan penurunan ini adalah perubahan strategis bank dalam rencana perluasannya, terutama ketika sebuah bank besar memutuskan untuk fokus pada pasar perkotaan. Hal ini sering kali mengarah pada penyaluran kembali sumber daya, seperti personel dan infrastruktur, ke wilayah perkotaan untuk memanfaatkan potensi pengembalian yang lebih tinggi yang terkait dengan pelanggan perkotaan. Akibatnya, investasi yang lebih rendah di wilayah perdesaan atau kurang menguntungkan menghasilkan penurunan signifikan dalam rasio agen bank di wilayah tersebut, menyebabkan distribusi agen bank yang tidak seimbang dan rasio agen

per desa atau per pelanggan yang lebih rendah di wilayah perdesaan dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Selain itu, munculnya dompet digital dan metode pembayaran online lainnya dapat mengalihkan transaksi keuangan dari agen bank tradisional dan ATM. Data kualitatif kami menggarisbawahi semakin pentingnya transaksi digital di daerah terpencil. Meskipun kehadiran fisik dan investasi pada agen tetap penting, penting untuk menyadari bahwa semakin besarnya ketergantungan konsumen pada platform pembayaran digital dapat berdampak pada permintaan akan agen bank tradisional dan ATM. Dinamika ini menyoroti perkembangan layanan perbankan dan perlunya pendekatan komprehensif yang menyeimbangkan saluran fisik dan digital untuk memenuhi kebutuhan nasabah secara efektif.

Data geografis yang digabungkan dengan penyedia jasa keuangan menunjukkan populasi yang kurang terlayani di seluruh wilayah Indonesia (Gambar 2). Di wilayah Barat, 34% penduduknya tidak terlayani. Wilayah Tengah, meskipun 53% penduduknya cukup terlayani, menghadapi tantangan besar dengan 35% penduduknya termasuk dalam kategori kurang terlayani, dan 11% sisanya termasuk dalam kategori belum terlayani. Wilayah Timur merupakan wilayah yang paling kurang terlayani, dengan hanya 10% penduduknya yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, dan 67% masih belum terlayani. Meskipun bukti anekdotal menunjukkan potensi masa depan yang lebih digital, membangun akses fisik untuk orientasi, pembayaran tunai masuk/keluar, literasi, dan penawaran produk dan layanan tambahan tetap penting. Selain memetakan lokasi ATM dan cabang bank saat ini, kami

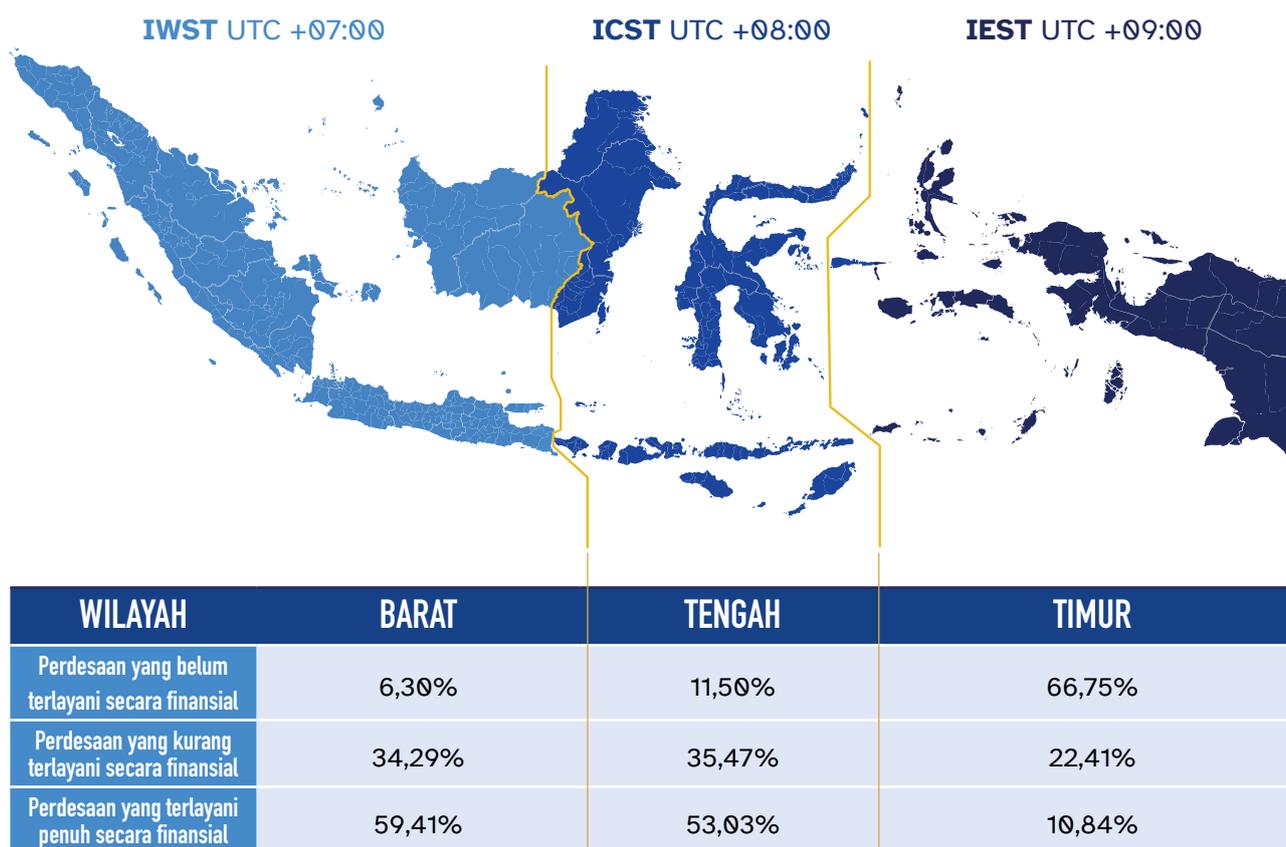
4. Data Podes dikumpulkan melalui survei yang mencakup seluruh desa di Indonesia, yang dilakukan tiga kali dalam periode 10 tahun. Kumpulan data mewakili informasi terbaru yang tersedia.

menilai perubahan yang kami sebut sebagai ‘penjangkauan’, yang dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perubahan jumlah ATM dan kantor cabang bank di seluruh wilayah antara tahun 2018 dan 2022. Hasilnya menunjukkan adanya penurunan penyediaan layanan di beberapa wilayah di luar Jawa, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur (Gambar 3), serta titik akses layanan keuangan di daerah-daerah yang kurang terlayani— meskipun terdapat peningkatan di daerah-daerah yang terlayani penuh (Gambar 4).

Dikotomi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam memastikan akses yang adil terhadap layanan keuangan. Penurunan layanan yang terus terjadi di daerah-daerah yang kurang terlayani, terutama di wilayah timur Indonesia, menekankan perlunya sasaran intervensi untuk menjembatani kesenjangan akses keuangan yang semakin lebar. Sementara

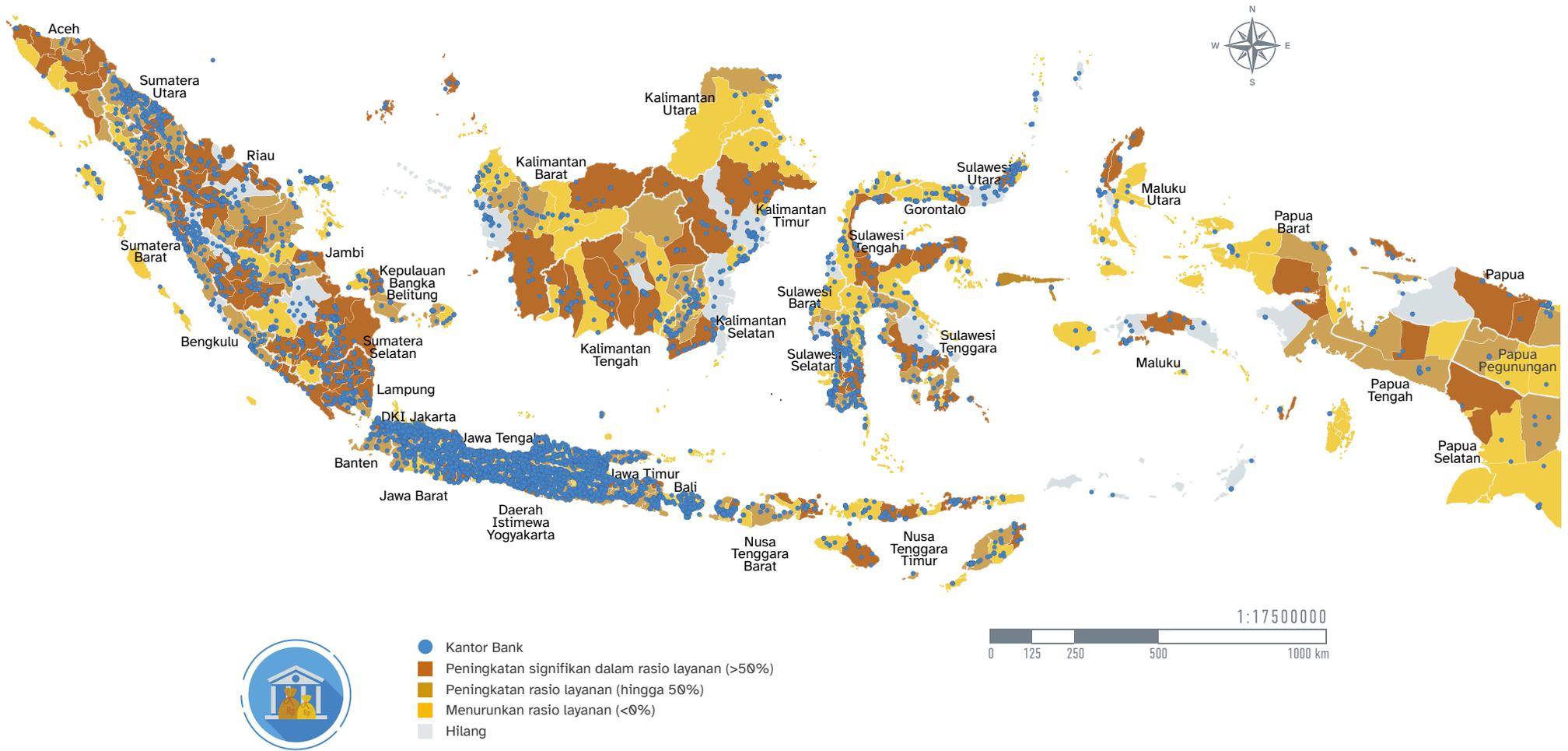
itu, peningkatan signifikan pada titik akses keuangan di wilayah-wilayah yang terlayani penuh menandakan perlunya inisiatif komprehensif di luar pusat kota untuk mengatasi kesenjangan dan mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Dalam memilih proksi jarak dari layanan keuangan, kami fokus pada aktivitas keuangan utama, termasuk menabung, mengambil pinjaman, dan melakukan transaksi pembayaran. Respons survei kami menunjukkan bahwa perempuan di daerah perdesaan sebagian besar terlibat dalam transaksi keuangan formal (dengan pembayaran Over the Counter (OTC) dan top-up menjadi pendorong utama, diikuti oleh tabungan dan pinjaman. Pilihan titik akses untuk transaksi OTC antara lain Payment Point Online Banking (PPOB) seperti PT Pos, Indomaret, dan Alfamart. Bagi mereka yang terlibat dalam simpan pinjam, cabang bank, Pegadaian, dan PPOB muncul sebagai pilihan titik akses mereka (lihat Gambar 9).

**GAMBAR 2. PEMETAAN WILAYAH YANG BELUM TERLAYANI DAN KURANG TERLAYANI SECARA FINANSIAL DI SELURUH INDONESIA**



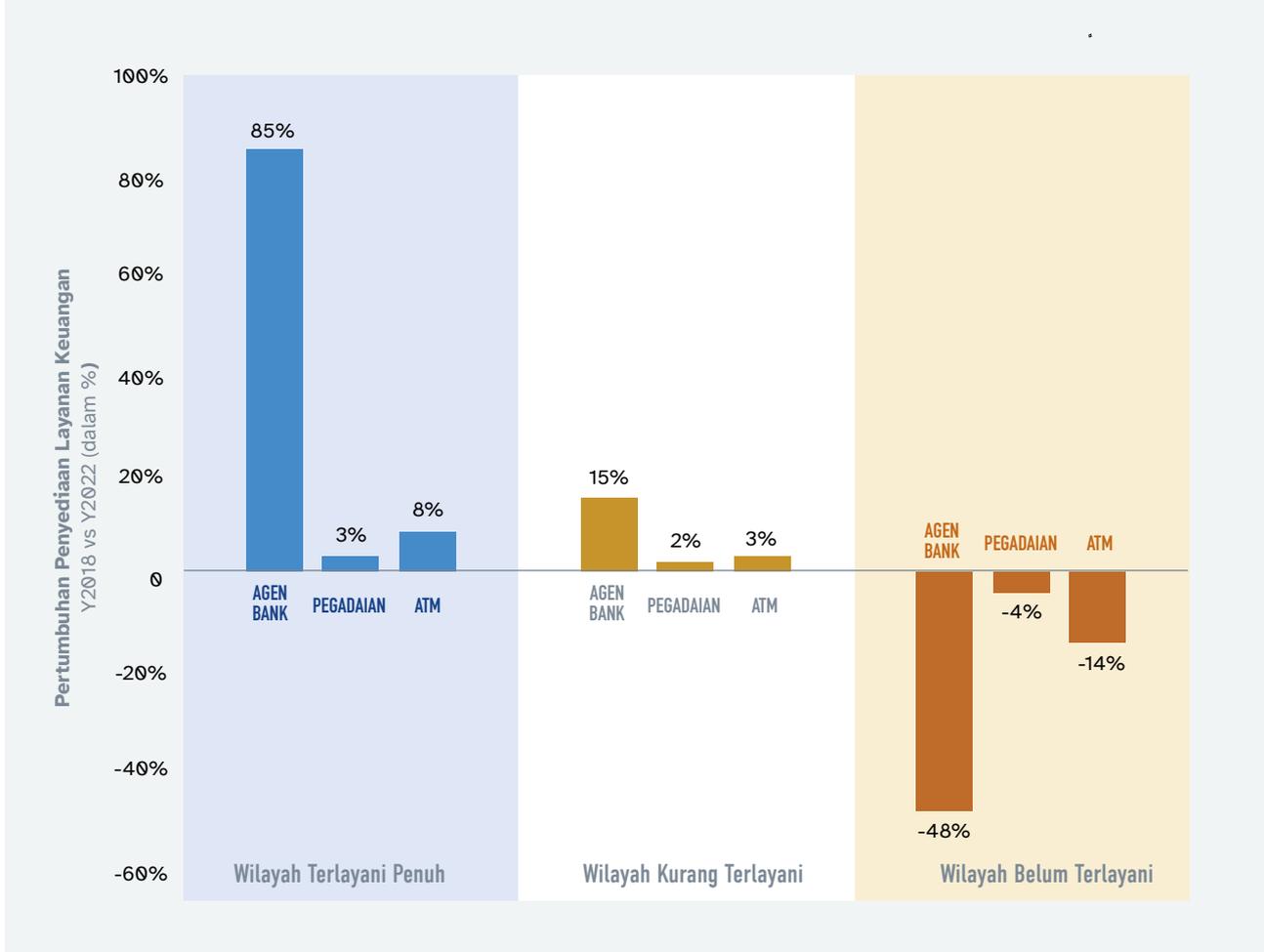
**Sumber:** BPS, 2022, dianalisis oleh penulis. Pemisahan berdasarkan zona waktu digunakan untuk memperhitungkan konteks timur/tengah/barat negara tersebut. ‘Perdesaan yang belum terlayani secara finansial’ didefinisikan sebagai desa yang tidak memiliki agen perbankan atau ATM dalam jarak 10 km. ‘Perdesaan yang kurang terlayani secara finansial’ didefinisikan sebagai desa yang tidak memiliki agen perbankan atau ATM, dengan jarak terdekat <10 km. ‘Perdesaan yang terlayani penuh secara finansial’ didefinisikan sebagai desa yang memiliki setidaknya satu agen perbankan atau ATM di desanya.

**GAMBAR 3. PERTUMBUHAN PENJANGKAUAN LAYANAN PERBANKAN HINGGA KE DAERAH-DAERAH ANTARA TAHUN 2018 HINGGA 2022**



**Sumber:** Data alamat bank cabang diperoleh dari berbagai penyedia jasa keuangan di Indonesia, baik yang diambil langsung dari situs web mereka yang tersedia untuk umum maupun yang disediakan oleh masing-masing bank. Total ada 12.693 alamat cabang bank yang dikumpulkan dari enam bank terbesar di Indonesia. Lokasi bank secara khusus ditentukan berdasarkan alamat lengkap kantor cabang dan agen perbankan milik negara dan swasta besar. Gradien arsiran tersebut menunjukkan pertumbuhan penjangkauan layanan perbankan kepada masyarakat di setiap daerah pada tahun 2018 hingga 2022. Beberapa data hilang dan tidak tersedia sehingga disajikan dalam bentuk area yang tidak diarsir. Setiap titik mewakili lokasi cabang bank yang sebenarnya. Kami mengategorikan perubahan jumlah titik akses (dalam persentase) cabang bank berdasarkan ambang batas numerik tertentu (<0, hingga 50%, >50%) selama periode 2018-2022. Data proyeksi penduduk tahun 2022 di tingkat kabupaten diambil dari Biro Pusat Statistik.

**GAMBAR 4. PERUBAHAN TITIK AKSES KEUANGAN DI INDONESIA, 2018–2022**



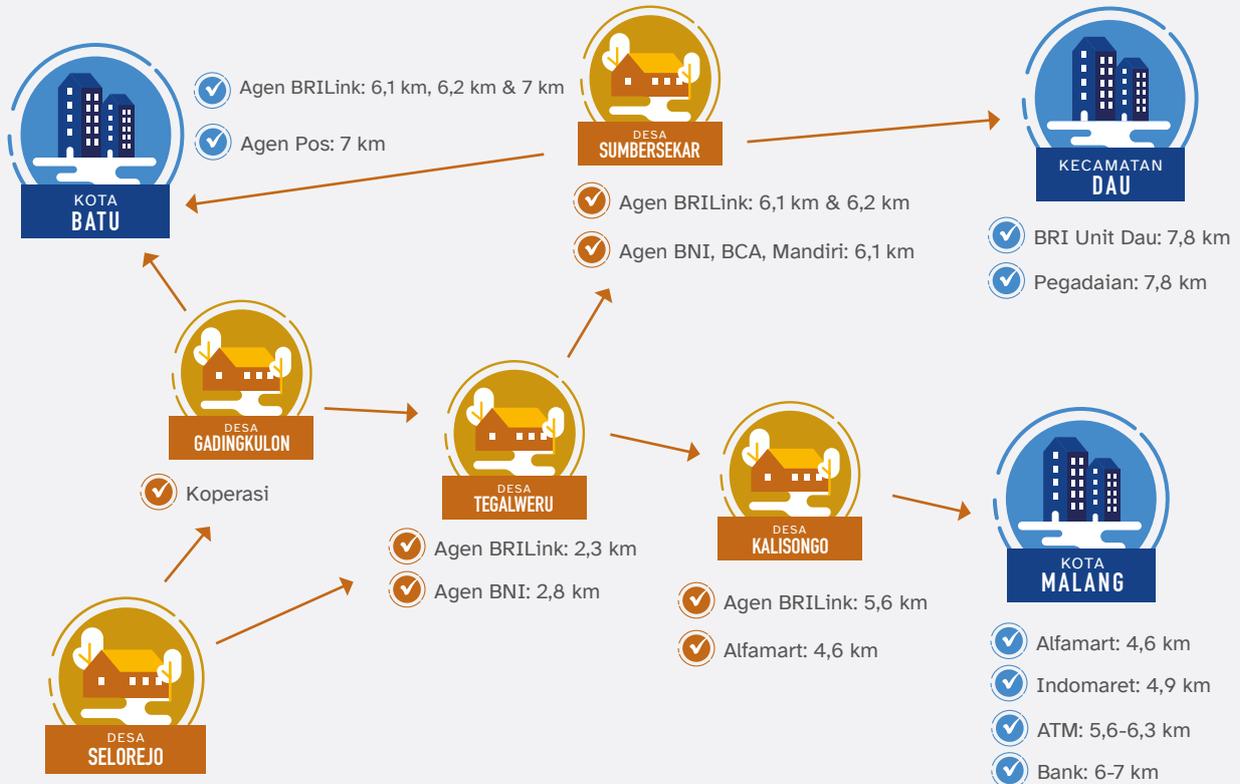
**Sumber:** BPS, dianalisis oleh penulis. ‘Terlayani penuh’: Setidaknya ada satu agen bank atau ATM di desa; ‘Kurang terlayani’: Tidak memiliki agen bank atau ATM di desa, namun akses ke salah satunya berjarak 10 km dari desa; ‘Belum terlayani’: Desa tanpa agen perbankan atau ATM atau dalam jarak 10 km. Persentase tersebut menunjukkan pertumbuhan penyediaan layanan dari tahun 2018 hingga 2022.

Kami mendapati bahwa sekitar 8% desa-desa di Indonesia mempunyai potensi untuk perluasan layanan keuangan: desa-desa tersebut mempunyai aktivitas ekonomi yang tinggi, namun ketersediaan layanan keuangan (diwakili oleh agen bank dan ATM) masih terbatas – sehingga

menjadikan desa-desa tersebut sebagai sasaran yang ideal untuk perluasan Titik Akses Keuangan (TAK). Sebagian besar desa tersebut tersebar tidak hanya di Indonesia Timur namun juga masih ada beberapa di Pulau Jawa (secara kiasan terlihat pada Gambar 5).<sup>5</sup>

5. Kami mengembangkan indeks potensi ekspansi jasa keuangan. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data resmi mengenai jumlah pasar, pertokoan, dan pusat ekonomi lainnya di berbagai wilayah; informasi ini berfungsi sebagai representasi kegiatan ekonomi dan tingkat produktivitas di setiap wilayah. Pada saat yang sama, data mengenai jumlah bank yang ada dikumpulkan untuk menilai ketersediaan layanan keuangan saat ini. Indeks tersebut kemudian dihitung dengan menetapkan perbandingan antara jumlah pusat ekonomi dengan jumlah bank di setiap daerah. Rasio yang lebih tinggi menyiratkan bahwa terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah TAK yang tersedia, yang mengindikasikan adanya potensi pasar yang belum atau kurang terlayani. Dasar pemikiran dari indeks tersebut adalah TAK cenderung mengikuti produktivitas kegiatan ekonomi di setiap wilayah. Oleh karena itu, tujuannya adalah untuk memastikan wilayah mana yang belum dan kurang terlayani yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi namun ketersediaan TAK rendah—atau sebaliknya, wilayah mana yang mengalami kelebihan pasokan jasa keuangan, yang dapat menjadi alasan untuk mengalihkan sumber daya ke wilayah lain.

**GAMBAR 5. SEKITAR DESA SELOREJO**



**Sumber:** Penulis. Berdasarkan kunjungan lapangan dan observasi pasar

### Ilustrasi: Ketahanan Keuangan Perempuan di Desa Selorejo

Gambar 5 menggambarkan titik akses keuangan bagi warga Selorejo. Selorejo dikenal sebagai salah satu penghasil jeruk siam dan kopi terbesar di Malang. Letaknya ~15 km dari Malang, merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur. Meskipun memiliki akses jalan raya dan potensi sebagai destinasi agrowisata, titik akses formal seperti cabang bank, ATM, dan PPOB letaknya jauh dari warga Selorejo.

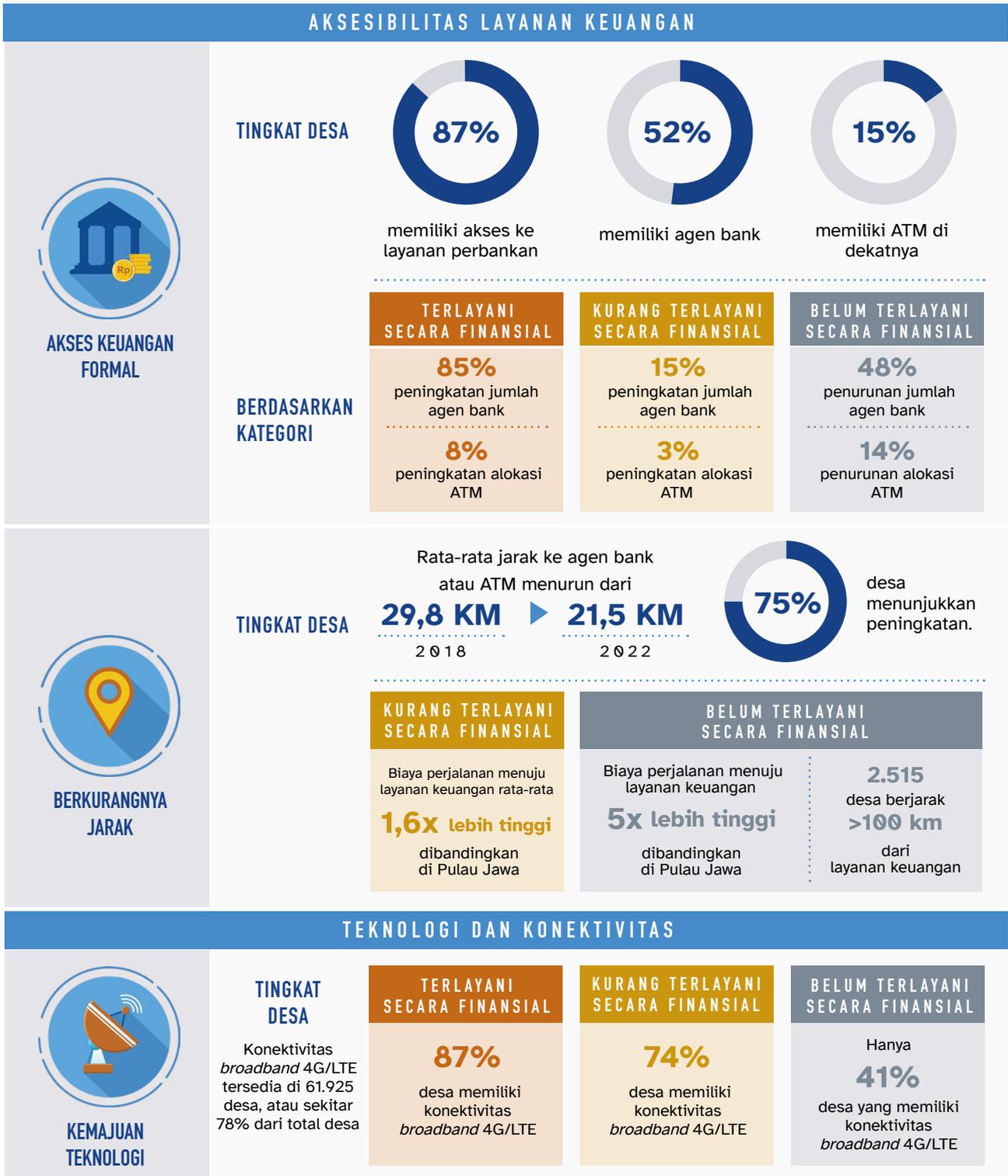
Di Desa Selorejo, titik akses keuangan terdekat yaitu dua agen perbankan di Desa Tegalweru dan sebelah timur Desa Selorejo (berjarak 2,3-2,8 km). Sementara mayoritas agen cenderung berkumpul di Desa Sumbersekar di Dau dan di Desa Junrejo di Batu, yang berjarak 6 km. Cabang bank terdekat, ATM, dan Pegadaian terletak 7-8 km dari desa yang dikenal dengan wilayah Sengkaling. Meskipun layanan berada dalam jarak 10 km, yaitu ambang batas yang ditetapkan oleh perempuan sebagai jarak yang dapat dijangkau, perempuan melaporkan bahwa layanan tertentu hanya dapat diselesaikan di cabang bank khusus di Kecamatan Karangploso atau Kecamatan Dau, yang keduanya berjarak 10-12 km dari Desa Selorejo.

Sebagai contoh, perempuan mengatakan bahwa mereka harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk menandatangani dokumen pinjaman atau meminta klarifikasi mengenai status pinjaman.

Layanan keuangan formal yang terpercaya mungkin menawarkan produk keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mata pencahariannya bergantung pada pertanian. Dengan ketergantungannya pada produksi jeruk siam dan kopi, Selorejo memiliki perekonomian yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Oleh karena itu, para petani kecil di Selorejo mungkin akan kehilangan pendapatan dan aset produktif ketika terjadi bencana alam, seperti kekeringan yang dapat berdampak buruk pada ketersediaan air, yang pada akhirnya memengaruhi hasil panen dan ternak, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi para petani kecil. Petani perempuan di Selorejo mengaku lebih memilih meminjam pada teman, keluarga, atau rentenir untuk kebutuhan darurat. Namun, ketika banyak jaringan sosial mereka kehilangan pendapatan secara bersamaan, mereka hanya mempunyai sedikit pilihan untuk mendapatkan pinjaman.

# Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani Memanfaatkan Strategi Pengelolaan Keuangan yang Kreatif di Tengah Keterbatasan Aksesibilitas Layanan Keuangan dan Risiko Iklim

GAMBAR 6. KARAKTERISTIK DESA YANG KURANG TERLAYANI DAN BELUM TERLAYANI



## PERILAKU KEUANGAN



### MATA PENCAHARIAN EKONOMI

- ✓ Banyak di antara mereka yang memiliki mata pencaharian informal yang terdiversifikasi, yang ditandai dengan sumber pendapatan yang berfluktuasi dan tidak menentu.
- ✓ Pengeluaran rumah tangga sehari-hari sebagian besar digunakan untuk membeli input produksi (misalnya bagi petani/nelayan) dan makanan sehari-hari. Sebagian besar transaksi bergantung pada uang tunai dan transaksi dilakukan secara langsung.



### PELUANG PEMBAYARAN DIGITAL

#### TINGKAT DESA

Perempuan sedikit mengungguli laki-laki dalam pembayaran digital kepada pedagang



#### SECARA NASIONAL



penduduk Indonesia pernah menggunakan transaksi e-banking



### PERILAKU MEMINJAM

#### INFORMAL

##### Akses kredit dari:

- ✓ Pedagang/offtaker (pembeli)
- ✓ Anggota keluarga dan teman
- ✓ Rentenir

Lebih banyak perempuan meminjam dari kelompok menabung dibandingkan dengan laki-laki



#### FORMAL

Perempuan melebihi laki-laki dalam meminjam dari lembaga formal



### PERILAKU MENABUNG

- ✓ Pada masa panen, menabung dalam jumlah besar merupakan hal yang lumrah.
- ✓ Tabungan informal dalam bentuk bahan makanan pokok, emas, dan perhiasan, serta hewan ternak.

Sumber: Wawasan statistik diperoleh dari analisis penulis. Data aksesibilitas jasa keuangan, teknologi dan konektivitas, serta perilaku keuangan berasal dari data BPS.



Di tengah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan tantangan iklim, penelitian kami mengungkap hambatan yang dihadapi oleh para perempuan ini. Temuan ini menyoroti strategi adaptif yang digunakan oleh perempuan tangguh untuk menavigasi medan keuangan yang rumit mulai dari diversifikasi pendapatan, metode tabungan kreatif, praktik peminjaman, pertanggungjawaban asuransi, dinamika pengiriman uang, dan peran dukungan masyarakat dan modal sosial. Kami memperluas strategi adaptif ini melalui deskripsi dan kutipan ilustratif dari penelitian kualitatif kami:

### Diversifikasi Pendapatan

Mata pencaharian informal yang dipengaruhi oleh aliran pendapatan yang beragam dan musiman merupakan hal yang lazim di kalangan nasabah yang tinggal di wilayah terpencil. 97% penduduk perdesaan Indonesia memiliki mata pencaharian yang bergantung pada pertanian atau terkait dengan pertanian (masing-masing 85% dan 8%), yang terutamanya bekerja di sektor pertanian dan perikanan.<sup>6</sup> Lebih lanjut, hasil penelitian ini menjelaskan diversifikasi sumber pendapatan yang proaktif di kalangan perempuan di daerah perdesaan: Menanggapi ketidakpastian yang melekat pada mata pencaharian utama mereka, banyak perempuan juga menunjukkan ketahanan dengan melakukan pekerjaan sampingan atau melakukan diversifikasi kegiatan pertanian atau akuakultur.<sup>7</sup> Pendekatan yang beragam ini tidak hanya berfungsi sebagai strategi mitigasi risiko namun juga berkontribusi pada landasan keuangan yang

lebih stabil bagi perempuan dan rumah tangga mereka. Dengan membudidayakan berbagai tanaman atau ikan atau melakukan kegiatan alternatif yang menghasilkan pendapatan, para perempuan ini menciptakan penyangga yang kuat terhadap fluktuasi pendapatan. Strategi adaptif tersebut tidak hanya meningkatkan ketahanan ekonomi mereka tetapi juga menggarisbawahi cara dinamis di mana perempuan perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani secara aktif mengelola dan menanggapi tantangan variabilitas pendapatan dalam upaya mereka mencapai keamanan finansial yang berkesinambungan.



Penghasilan utama saya dari budidaya udang dan bandeng. Saya membutuhkan waktu masing-masing 3 bulan dan 6 bulan untuk memanennya. Saya menjual seluruh udang kepada pembeli (offtaker) tertentu yang memberi saya pinjaman; ini satu-satunya cara bagi saya untuk membayar kembali pinjaman itu. Saya juga mencari kepiting sambil menunggu panen udang dan bandeng. Baru-baru ini saya membuka warung makan kecil-kecilan, memanfaatkan teras rumah saya. Saya juga menggunakan uang hasil penjualan makanan untuk membeli makanan untuk keluarga saya.”

Seorang nelayan perempuan, 56 tahun, Tarakan – Kalimantan Utara

6. Statistik Potensi Desa (Podes) 2022

7. Petani perempuan merupakan seperempat dari angkatan kerja pertanian di Indonesia



## Menyimpan Uang

Responden perempuan memprioritaskan menabung sebagian dari pendapatan mereka pada saat-saat baik untuk mendapatkan perlindungan finansial selama saat-saat sulit. Secara khusus, mereka mencari dan menerapkan strategi yang disesuaikan dengan musim untuk mengurangi kerentanan rumah tangga dan mempertahankan tingkat konsumsi di masa sulit, sering kali menggunakan berbagai saluran tabungan.

Kelompok tabungan informal komunitas keagamaan menawarkan sumber tabungan lain, sehingga perempuan dapat secara strategis menyetor dana untuk kebutuhan masa depan atau pada periode pendapatan yang lebih rendah.



Saya bisa mendapat Rp50 juta setiap musim panen jeruk dan sebagian dari uang itu saya simpan di salah satu toko kelontong terdekat. Saya yakin melakukan hal itu karena saya kenal baik pemiliknya dan saya mempercayainya. Saya mempunyai perkiraan berapa banyak [uang yang ada] ketika saya datang dan mengambil barang belanjaan rutin saya. Jadi, ketika saya kehabisan beras, saya dapat dengan mudah mengambil sekarung beras lagi yang saya butuhkan dari toko itu sampai saldo saya habis. Saya dan pemilik sama-sama menyimpan buku catatan kami untuk tujuan pelacakan kami. Pada dasarnya, menabung di toko kelontong membantu saya menyimpan uang saya dengan aman dan memberi saya jaminan bahwa keluarga saya tidak akan kelaparan, setidaknya untuk waktu delapan bulan ke depan."

Seorang petani perempuan, 52 tahun, Selorejo – Jawa Timur



Wawancara dengan LSM yang melayani kelompok petani dan nelayan melaporkan:



Di Sulawesi Utara, sekelompok nelayan memanfaatkan komunitas gereja sebagai sarana menabung karena tidak adanya penyedia layanan keuangan di sekitar mereka. Secara rutin, mereka menyetor dana ke gereja pada saat ibadah mingguan dan menariknya saat perayaan Natal. Di wilayah lain di mana para nelayan sangat bergantung pada pembeli/pengepul, beberapa nelayan tidak hanya menumpuk hutang pada para pengepul tersebut namun juga menabung dalam jaringan mereka. Bagi masyarakat yang berada di dekat atau di sepanjang Jalan Raya Trans-Sulawesi, mereka menerapkan pendekatan tabungan kolektif, dengan mengkonsolidasikan dana yang kemudian disetorkan ke suatu rekening bank. Cara ini dinilai lebih efisien dalam hal penghematan biaya dibandingkan tabungan perbankan perorangan.”

Pakar Gender dan Inklusi Keuangan, Indonesia

Namun, berpartisipasi dalam skema tabungan informal yang difasilitasi oleh lembaga keagamaan dapat memberikan tekanan sosial yang kuat—khususnya ketakutan individu akan penilaian atau konsekuensi sosial jika tidak berpartisipasi, yang berpotensi menjadi hambatan bagi tabungan formal. Selain itu, keamanan dana di sektor informal – sebuah kekhawatiran yang sering disuarakan di Indonesia, kurangnya transparansi dan akuntabilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, meningkatkan potensi risiko seperti pencurian wadah sumbangan di masjid atau gereja.

Kelompok tabungan informal di belahan dunia lain tetap bertahan meskipun terdapat saluran formal untuk menabung, baik karena alasan sisi permintaan maupun penawaran. Di sisi permintaan, misalnya, saluran informal terikat pada modal sosial dan jaringan kepercayaan, dengan aktivitas tabungan sebagai bagian dari keterlibatan masyarakat. Dari sisi penawaran, lembaga keuangan mengalami kesulitan untuk menciptakan kembali aspek komitmen terhadap tabungan yang mendorong keterlibatan berkelanjutan. Di Indonesia, penyedia jasa keuangan dapat belajar dari mekanisme informal jika mereka ingin meningkatkan aktivitas tabungan di rekening formal, seperti yang dijelaskan dalam Ashraf dkk. (2006). Membangun saluran perbankan yang mudah diakses dan aman, ditambah dengan komunikasi yang transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diterapkan, dapat mengurangi kekhawatiran mengenai kerentanan dana. Menawarkan program literasi keuangan untuk menekankan manfaat dan keamanan tabungan formal, sambil menghormati pentingnya budaya menabung masyarakat, akan membantu mengurangi tekanan sosial yang terkait dengan skema informal.

## Meminjam

Praktik yang lazim dan penting di kalangan perempuan di daerah perdesaan adalah meminjam uang, baik dari keluarga, teman, atau melalui pinjaman formal atau informal. Pendekatan yang tersebar luas ini berfungsi sebagai penyelamat keuangan, yang memungkinkan perempuan memenuhi kebutuhan mendesak dan berinvestasi dalam penghidupan pribadi dan rumah tangga.

Akses terhadap keuangan yang terjangkau dan mudah diakses muncul sebagai katalisator pemberdayaan perempuan perdesaan. Kredit sebagai alat keuangan yang disediakan oleh Penyedia Jasa Keuangan formal yang dapat diakses memungkinkan perempuan menabung untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan dan memberikan bantuan keuangan kepada anggota keluarga pada saat dibutuhkan atau dalam keadaan darurat. Oleh karena itu, sifat pinjaman yang beragam memainkan peran penting dalam menumbuhkan ketahanan dan keberlanjutan ekonomi di kalangan perempuan di daerah perdesaan, yang menggambarkan peran penting sumber daya keuangan yang dapat diakses dalam mentransformasikan tidak hanya kehidupan individu tetapi juga seluruh masyarakat.



Rata-rata penduduk Selorejo memiliki pinjaman KUR di BNI dan BRI. Saya dan suami saya sudah bertahun-tahun mengambil pinjaman KUR, dan karena sudah mendapat kepercayaan dari bank tersebut, saya tidak memerlukan lagi sertifikat sebagai jaminan. Pinjaman KUR suami saya dari BRI digunakan untuk membayar sewa tanah dan sudah lunas. Dulu kami mengetahui pinjaman KUR dari karyawan BRI yang berkunjung ke rumah kami. Selain sewa tanah, pinjaman KUR BRI juga digunakan untuk biaya produksi sebesar Rp25 juta, pengeluaran rumah tangga, dan sumbangan bulanan untuk perayaan rata-rata Rp2,5 juta."

Seorang petani perempuan, 52 tahun, Selorejo – Jawa Timur



Pengamatan lapangan menunjukkan bahwa penerimaan dan kelayakan penggunaan aset pribadi sebagai jaminan atas pinjaman terjamin sangat terkait dengan dinamika sosial-budaya, norma-norma dan persepsi kepemilikan aset oleh perempuan (Kotak 3). Di daerah-daerah di mana kepemilikan aset oleh perempuan dianggap tidak lazim dalam norma-norma tradisional atau di mana sikap komunal memengaruhi pengambilan keputusan keuangan, penyerapan pinjaman terjamin oleh perempuan mungkin akan terkena dampaknya. Penelitian lebih lanjut untuk menggali faktor-faktor khusus yang memengaruhi penurunan serapan pinjaman yang diamati di kalangan perempuan di daerah-daerah tersebut sangatlah penting.

### KOTAK 3. Variasi Regional: Pengaruh Norma Sosial dan Praktik Budaya terhadap Kepemilikan Properti oleh Perempuan

Di beberapa daerah di Indonesia bagian barat, kami mendapati bahwa norma sosial dan budaya telah menentukan kepemilikan tanah, sehingga berdampak pada kemampuan perempuan untuk mengakses pinjaman terjamin:



#### DESA SELOREJO

Di Selorejo – Jawa Tengah, perempuan mempunyai hak hukum atas kepemilikan tanah dan rumah. Namun adat istiadat masih memengaruhi pola pewarisan, yang lebih mengutamakan ahli waris laki-laki. Kepemilikan kartu tani, yang diperlukan untuk mengakses subsidi pertanian, sering kali ditentukan oleh luas lahan, sehingga berpotensi merugikan perempuan yang memiliki lahan lebih kecil.



#### DESA RUMPIN

Di Rumpin – Jawa Barat, responden kami menjelaskan bahwa sebagian besar kepemilikan tanah dipegang oleh pemerintah atau pengembang, sehingga perempuan bergantung pada tanah atas nama suami atau anggota keluarga lainnya. Skenario ini menekankan kurangnya kepemilikan resmi, dan tantangan terkait yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan hak atas properti. Selain itu, tradisi yang hanya mencantumkan nama suami pada sertifikat tanah semakin berkontribusi terhadap ketimpangan kekuasaan berbasis gender dalam kepemilikan tanah.



#### DESA TARAKAN

Di Tarakan – Kalimantan Utara, terdapat beberapa kasus di mana perempuan menggunakan tanah mereka sebagai jaminan pinjaman, yang menyajikan sebuah skenario di mana praktik kepemilikan tanah adat membedakan antara tanah dati dan pusaka, di mana laki-laki secara tradisi memegang kendali atas tanah dati dan perempuan atas tanah pusaka.



#### DESA KOTAMOBAGU

Budaya lokal di Kotamobagu – Sulawesi Utara, yang dipengaruhi oleh Adat Mongondow, juga mengakui hak-hak perempuan atas kepemilikan properti, dan warisan dan pembelian bersama yang melibatkan kedua pasangan adalah hal yang biasa. Praktik budaya ini tidak hanya memberdayakan perempuan tetapi juga mencerminkan pengakuan yang lebih luas terhadap kesetaraan gender dalam kepemilikan properti. Namun, sertifikasi tanah masih menjadi permasalahan karena sebagian perempuan tidak memiliki dokumentasi resmi mengenai hak kepemilikan mereka.

## Pertanggungjawaban Asuransi

Penelitian kami menggarisbawahi tantangan besar dalam penerapan produk asuransi di kalangan petani perdesaan, khususnya dalam konteks hasil pertanian dan risiko iklim. Meskipun ada risiko yang melekat yang terkait dengan pertanian, seperti pola cuaca yang tidak dapat diperkirakan, tidak ada petani yang diwawancarai yang memiliki asuransi panen. Pekerja informal, yang sering bekerja di sektor nonformal atau tidak terikat peraturan, mungkin tidak secara otomatis dimasukkan dalam Universal Health Coverage/jaminan kesehatan semesta (BPJS). Pekerja informal mungkin menghadapi tantangan dalam memenuhi persyaratan atau berkontribusi pada program karena pendapatan yang tidak teratur, dan kurangnya kontrak kerja formal. Selain itu, petani perempuan lebih mengandalkan pendapatan selain pertanian dibandingkan membeli



Kerugian usaha pertanian di masa Covid tidak hanya berdampak pada keuangan keluarga tetapi juga berdampak pada kesehatan fisik saya. Saya mengalami gejala darah tinggi, sehingga saya harus membeli obat Amlodipine dari kantong saya sendiri karena saya tidak memiliki asuransi kesehatan (BPJS). Untuk mengatasi kerugian usaha di masa pandemi Covid, saya bekerja sebagai buruh tani di lahan tetangga, dengan upah harian sebesar Rp50.000. Meskipun ada kalanya saya tidak punya penghasilan, saya tidak meminjam uang. Sebaliknya, saya memilih hidup hemat dan menjual jeruk kepada siapa pun yang mau membeli. Selama kurun waktu tersebut, saya juga menjual emas saya untuk modal menyewa tanah lagi dan menutupi pengeluaran sehari-hari.”

Seorang petani perempuan, 52 tahun, Selorejo – Jawa Timur

asuransi panen untuk mengatasi risiko iklim; keraguan mereka disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran mengenai pilihan asuransi panen yang tersedia dan terbatasnya pemahaman tentang cara mengakses dan memanfaatkan layanan tersebut. Demikian pula dalam bidang kesehatan, penelitian kami menggarisbawahi kurangnya kesadaran di kalangan petani perempuan mengenai BPJS. Bahkan di antara mereka yang sudah mengenal BPJS, pengetahuan mereka terutama didasarkan pada pemahaman dan pengalaman individu di masa lalu tentang BPJS Kesehatan (tunjangan kesehatan). Menariknya, tidak ada satupun responden yang mengetahui tentang BPJS Ketenagakerjaan (program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk klaim terkait pekerjaan) yang dirancang untuk penerima nonupah seperti petani atau nelayan. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan menawarkan pertanggungjawaban yang komprehensif untuk risiko terkait pekerjaan, termasuk kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan program pensiun bagi penerima upah dan nonupah, temuan kami menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan, khususnya di antara 60% penduduk usia kerja yang bekerja di sektor informal (BPS Sakernas, 2023). Hingga Juli 2023, program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan telah memberikan perlindungan bagi 27% seluruh angkatan kerja Indonesia, yang mencakup 7,61% pekerja sektor informal.

## Pengiriman dan Penerimaan Uang

Perempuan yang diwawancarai juga menemukan cara untuk mengurangi biaya transaksi ketika mengirim atau menerima bantuan keuangan dari teman dan keluarga. Sebuah tren yang patut disimak, misalnya, perempuan dan anggota keluarga mereka menggunakan berbagai platform pengiriman uang, yang mendemonstrasikan pemahaman yang baik untuk mengoptimalkan transaksi keuangan untuk mengurangi biaya. Pendekatan adaptif ini mencerminkan ketahanan dan strategi pengelolaan keuangan yang cerdas oleh para perempuan untuk menjamin keberlanjutan rumah tangga mereka di tengah tantangan ekonomi.



Anak saya tinggal di kota yang berbeda untuk melanjutkan pendidikannya. Dia mengajari saya mendaftar ke platform dompet elektronik (e-wallet) yang juga dia gunakan. Pengisian saldo di platform tersebut sangatlah mudah karena saya dapat mengakses Alfamart terdekat untuk melakukan pencairan saldo tanpa biaya administrasi. Dengan dompet elektronik ini kami sama-sama mendapat keuntungan. Saya dapat mengirimkan uang saya dengan bebas dan anak saya dapat menggunakan sisa saldo di rekeningnya untuk menjual pulsa kepada teman-temannya.”

Seorang nelayan perempuan, 38 tahun,  
Sangtombolang – Sulawaesi Utara

Aspek risiko keamanan yang mungkin dihadapi perempuan saat menggunakan layanan pengiriman yang berbeda penting untuk dipertimbangkan. Kendati perempuan secara cerdas menemukan cara untuk menghemat biaya, mereka perlu mewaspadaai potensi penipuan atau peretas yang mengakses akun mereka. Beberapa platform mungkin mengenakan biaya yang lebih tinggi, yang bisa menyulitkan perempuan yang tidak mengetahui pilihan layanan lainnya. Hal ini bisa membuat mereka kehilangan uang yang mereka kirim atau terima. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengatasi risiko ini dan memastikan perempuan memahami apa yang dikenakan biaya untuk membantu mereka mengelola uang dengan lebih baik dan tetap aman secara finansial. Solusi 'Figital' (Fisik-Digital) dapat memberikan lapisan perlindungan tambahan dengan memungkinkan mereka melakukan transaksi melalui saluran fisik, seperti lokasi agen atau pusat layanan, sambil tetap memanfaatkan platform digital untuk kenyamanan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keamanan, tetapi juga memastikan aksesibilitas bagi perempuan yang memiliki literasi digital atau akses terhadap teknologi yang terbatas, sehingga memberdayakan mereka untuk mengelola keuangan secara lebih efektif dan memitigasi risiko yang terkait dengan transaksi digital.





## Dukungan Masyarakat dan Modal Sosial

Dukungan masyarakat merupakan bagian integral bagi perempuan yang menghadapi tantangan keuangan di daerah-daerah terpencil, di mana jaringan keluarga, tetangga, pembeli atau pengepul, dan masyarakat setempat memberikan bantuan penting. Dukungan ini, mulai dari emosional hingga finansial, merupakan sumber daya yang penting selama masa-masa sulit secara finansial. Yang patut mendapat perhatian khusus adalah peran kepercayaan diri dan masyarakat dalam mendorong akses terhadap pinjaman informal, yang menunjukkan pentingnya kekompakan sosial dalam memastikan ketahanan finansial di kalangan perempuan di masyarakat-masyarakat ini.

“

Setiap hari saya menjual ikan hasil tangkapan suami saya. Ketika hasil tangkapannya sedikit, saya akan pergi ke pelabuhan terdekat untuk membeli ikan dari nelayan lain yang saya kenal baik. Jika harganya sesuai dengan saya, saya membayar para nelayan ini di muka. Tapi kalau harganya tidak sesuai, ikannya saya jual dulu baru saya bayar. Biasanya keuntungan saya berkisar Rp120.000-125.000 dan sebagian besar saya gunakan untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”

Seorang perempuan pedagang ikan, 45 tahun  
Pulau Saparua – Maluku Tengah

## Mobilitas, Akses Internet, dan Adopsi Digital Masih Menjadi Tantangan dalam Penggunaan Layanan dan Produk Keuangan Formal



### Mobilitas dan Akses Jalan merupakan Pertimbangan Penting dalam Memilih Akses Keuangan

Kedekatan dan biaya perjalanan merupakan faktor penting dalam aksesibilitas perempuan terhadap layanan keuangan formal di daerah perdesaan. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kalimantan, Maluku, dan Papua mengeluarkan biaya perjalanan lima hingga sembilan kali lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di Pulau Jawa<sup>8</sup> (Lihat Lampiran D, Gambar 12). Lebih lanjut, analisis data kami mengenai Podes 2022<sup>9</sup> menyoroti bahwa kabupaten-kabupaten tertentu di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan mengalami kenaikan biaya perjalanan untuk mengakses layanan keuangan yang menyiratkan bahwa layanan keuangan mungkin menjadi kurang mudah diakses di kabupaten-kabupaten ini. Pergeseran ini, berdasarkan data yang ada, menunjukkan adanya potensi konfigurasi ulang distribusi layanan keuangan yang jauh dari masyarakat di wilayah-wilayah tersebut.

Ketersediaan transportasi umum juga berperan penting dalam aksesibilitas, ditambah dengan penyelarasan jadwal transportasi dengan jam operasional lembaga keuangan. Sebagai contoh, meskipun minibus umum menawarkan harga yang terjangkau, ketersediaannya yang terbatas pada hari-hari tertentu mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi alternatif yang lebih mahal seperti sepeda motor, sehingga secara signifikan meningkatkan biaya transportasi bagi perempuan terutama pada akhir pekan. Dalam skenario seperti ini, biaya transportasi mungkin lebih besar daripada manfaat mengakses layanan keuangan, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan.

Aspek keselamatan semakin menambah tantangannya. Daerah dengan kondisi perjalanan yang aman akan

8. Di antaranya adalah Desa Subang Jaya, Lampung Tengah yang jaraknya ke Bank bertambah kurang lebih 97 KM. Selain itu, jarak perjalanan menuju titik akses keuangan masyarakat di Papua hampir 9 kali lebih jauh dibandingkan penduduk di Pulau Jawa.

9. Lihat Lampiran D.



### HAMBATAN AKSESIBILITAS KE LEMBAGA KEUANGAN

menciptakan lingkungan yang lebih mendukung aksesibilitas layanan keuangan, karena individu merasa lebih aman melakukan perjalanan, sehingga mendorong untuk mendatangi lembaga keuangan. Sebaliknya, daerah dengan tingkat kejahatan yang tinggi, terutama di daerah kumuh, menimbulkan risiko bagi perempuan, terutama pada perjalanan malam hari. Kekhawatiran akan pencurian atau kekerasan dapat menghalangi perempuan



Angkutan umum di Rumpin sering kali tidak tersedia karena tidak ada peminatnya. DAMRI<sup>10</sup> terlihat setiap 3-4 jam pada akhir pekan, namun biayanya mahal untuk perjalanan jarak pendek karena mengenakan tarif tunggal sebesar Rp10.000 berapa pun jaraknya. Melayani mobilisasi antarkota dari Cicangkal, Kecamatan Rumpin hingga Kecamatan Leuwiliang.”

Seorang kepala desa, 28 tahun, Rumpin – Jawa Barat



Saya tidak bisa mengendarai sepeda motor karena saat ini saya tidak memilikinya. Kalau saya mau transfer uang ke keluarga saya di kampung halaman (Makassar), saya akan minta adik saya ke agen (PPOB) terdekat.”

Seorang nelayan perempuan, 31 tahun, Tarakan – Kalimantan Utara

mengakses layanan keuangan setelah hari menjadi gelap, sehingga membatasi kemampuan mereka untuk mengelola keuangan secara efektif. Selain itu, permasalahan terkait keselamatan jalan raya di daerah dengan infrastruktur yang tidak memadai dan jalan yang berbahaya memberikan tantangan bagi perempuan, terutama saat bepergian dengan sepeda motor. Ketakutan akan kecelakaan atau cedera selama perjalanan menjadi penghalang, sehingga semakin menghambat upaya inklusi keuangan di wilayah-wilayah tersebut.

10. DAMRI adalah perusahaan angkutan umum milik negara yang melayani secara nasional dengan bus kecil, menengah, dan besar.

## Pemakaian Digital di Kalangan Perempuan Perdesaan Masih Bergantung pada Kesiapan Internet dan Pengetahuan Digital dengan Intervensi *Top-Down* dan Pendekatan yang Didorong oleh Pemerintah



Ketersediaan internet muncul sebagai faktor penting yang memengaruhi pemakaian layanan keuangan digital, di mana responden di daerah perdesaan menunjukkan kemungkinan lebih besar untuk menggunakan layanan ini bila dilengkapi dengan koneksi internet yang stabil. Kemajuan yang dicapai dalam meningkatkan akses *broadband* di seluruh Indonesia, yang didorong oleh kemajuan teknologi dan keberadaan telepon seluler di mana-mana, telah membuka jalur bagi pembayaran digital dan layanan *mobile banking*. Namun tantangan masih ada, khususnya di wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Papua, di mana akses internet masih lemah (lihat Lampiran B, Gambar 13).<sup>11</sup>

Di lokasi seperti Petung (Kalimantan Timur), Tarakan (Kalimantan Utara), kami mendapati QRIS dan dompet elektronik sering digunakan, terutama di kafe dan supermarket. Hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan opsi pembayaran digital atau ketersediaan infrastruktur yang diperlukan, seperti mesin EDC dan terminal QRIS. Jika demikian, hal ini menunjukkan bahwa penyedia jasa keuangan mengambil keputusan *top-down* untuk memperluas opsi pembayaran digital ke daerah-daerah yang lebih terpencil melalui jaringan agen.

Percakapan dengan perempuan perdesaan yang mahir bertransaksi menggunakan QRIS di agen perbankan dan minimarket terdekat menunjukkan pola yang konsisten. Di daerah-daerah yang banyak menggunakan dompet elektronik, generasi muda menjadi pengguna awal platform keuangan digital apa pun, sehingga memengaruhi masyarakat lainnya untuk mengeksplorasi dan mengadopsi platform ini. Data kualitatif kami dari Pulau Saparua menguatkan hal ini, yang mengungkapkan bahwa sejumlah besar generasi muda memiliki ponsel pintar dan menunjukkan kemampuan menggunakan aplikasi digital. Antusiasme dan pengalaman positif mereka dengan platform keuangan digital berkontribusi pada rasa ingin tahu dan keterbukaan masyarakat luas untuk mengeksplorasi dan akhirnya mengadopsi solusi teknologi tersebut. Dampak yang mengalir ini menggarisbawahi peran yang sifatnya memengaruhi yang dimainkan oleh kaum muda, sebagai pengguna awal, dalam membentuk perilaku dan preferensi keuangan masyarakat luas di daerah perdesaan. Sebaliknya, di wilayah di mana QRIS dan dompet elektronik jarang digunakan dan ketersediaan serta keandalan mesin EDC dan terminal QRIS tidak pasti, dunia usaha mungkin kekurangan peralatan yang diperlukan untuk mendukung penerapan pembayaran digital.

11. 4% desa belum merasakan peningkatan konektivitas *broadband* dalam beberapa tahun terakhir. Demikian pula dengan rata-rata 4% desa yang masih memiliki konektivitas internet 2G. Terdapat beberapa daerah di Pulau Jawa dan Sumatera yang akses internetnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan, sebagian besar daerah yang mengalami kemajuan stagnan terletak di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua (Sumber: Analisis Penulis dari data Podes). Meskipun kami tidak melakukan survei kuantitatif primer, penelitian kualitatif kami mengungkapkan bahwa semua responden di perdesaan kami memiliki ponsel pintar. Selain itu, berdasarkan data terakhir BPS (2022), kepemilikan ponsel pintar di perdesaan sebesar 60,18%, meningkat signifikan sebesar 8% dibandingkan kepemilikan di perkotaan.

## Agen Pembayaran dan Perbankan Perdesaan Merupakan Titik Kontak yang Dapat Dipercaya untuk Digunakan oleh Perempuan Secara Berkelanjutan, namun Agen-Agen ini Kesulitan Mempertahankan Operasi Mereka Karena Masalah Mobilitas. Hambatan ini Memengaruhi Efisiensi dan Kemampuan Mereka untuk Memberikan Layanan yang Efektif, dan Menimbulkan Tantangan Likuiditas, yang Semuanya Penting untuk Menjaga Stabilitas Keuangan Para Agen

Kepercayaan memainkan peran penting dalam pemakaian layanan keuangan. Orang-orang mungkin lebih cenderung untuk membuka rekening bank atau terlibat dengan lembaga keuangan jika mereka memiliki perantara yang terpercaya, seperti anggota keluarga atau teman, yang dapat membimbing mereka melalui proses tersebut. Untuk memperluas layanan perbankan formal kepada masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, bank-bank fisik menggunakan agen perbankan, di mana anggota masyarakat bertindak sebagai perantara. Beroperasi di toko-toko kecil, agen-agen ini membangun koneksi pribadi; agen perempuan dianggap sangat cocok untuk peran tersebut karena memiliki kualitas seperti keterampilan komunikasi yang kuat dan kesabaran.



Saya mengetahui DANA dari anak saya yang kuliah di Manado; dia menggunakan DANA untuk menerima transfer uang dari saya dan menggunakannya untuk menjual pulsa telepon ke teman-temannya. Anak saya meminta saya membuka rekening DANA untuk membeli pulsa, membayar tagihan, dan mengirim uang kepadanya. Staf Alfamart bisa mengajarkan saya cara menggunakannya karena mereka adalah masyarakat lokal dan sangat ramah. Biasanya saya ke Alfamart untuk mengiriminya uang karena tidak dipungut biaya. Namun, jika terjadi kesalahan sistem di Alfamart, saya harus pergi ke agen BRILink terdekat – sekitar 5 kilometer untuk melakukannya, dan agen tersebut mengenakan biaya Rp10.000 per transaksi.”

Seorang nelayan perempuan, 38 tahun,  
Bolaang Mongondow – Sulawesi Utara

Agan perdesaan ini menerapkan strategi diversifikasi ketika mengelola bisnis agen, yang menggabungkan bisnis mereka dengan aktivitas yang menghasilkan pendapatan lainnya. Keberlanjutan finansial mereka bergantung pada biaya layanan dan biaya pembagian yang diperoleh dari transaksi yang penting untuk menutupi biaya operasional. Namun, pengelolaan likuiditas terbukti menantang karena memerlukan keseimbangan antara uang tunai untuk transaksi harian dan transaksi digital untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Untuk meningkatkan pendapatan mereka dari bisnis agen ini, agen melaporkan menyesuaikan jam kerja mereka untuk mengakomodasi kebutuhan pelanggan, menggabungkan layanan agen dan toko kelontong untuk meningkatkan keuntungan, dan menawarkan layanan *mobile agent* (agen bergerak) kepada pelanggan yang lebih memilih transaksi jarak jauh. Agen sering kali merupakan agen tunggal di wilayah tersebut dan beroperasi dengan perpanjangan jam kerja dengan mengandalkan rekomendasi dari mulut ke mulut untuk distribusi dan pemasaran.<sup>12</sup>



Untuk menjamin profitabilitas para agen, bank harus melakukan upaya tambahan dalam mendidik mereka untuk menjadi perwakilan Teller dan Layanan Pelanggan: memahami dan menjelaskan secara efektif produk keuangan seperti tabungan dan deposito, memahami sistem teknis, dan mahir dalam memberikan pendidikan sederhana dan layanan konsultasi mengenai produk yang cocok untuk pelanggan.”

SVP Perbankan Segmen Mikro, Indonesia

12. Kami mewawancarai 12 agen bank di perdesaan untuk memahami persepsi mereka tentang bagaimana menjadi agen perbankan yang sukses.



Data wawancara menandakan tantangan signifikan yang dihadapi oleh agen perdesaan mengenai pemahaman agen dan nasabah terhadap produk bank dan fitur aplikasi perbankannya. Tantangan ini tidak hanya terjadi pada para agen saja; tantangan ini juga menghadirkan tantangan bagi bank itu sendiri. Untuk memastikan profitabilitas agen, bank harus berinvestasi lebih banyak dalam pendidikan agen; menjembatani kesenjangan pengetahuan para agen menjadi hal yang sangat penting tidak hanya bagi keberhasilan para agen namun juga bagi efektivitas keseluruhan inisiatif inklusi keuangan di masyarakat perdesaan.

“

Sambil melakukan kampanye penyadaran, kami dapat menginformasikan kepada masyarakat tentang keberadaan dan fungsi agen perbankan kami di wilayah tersebut. Kami dapat menjelaskan secara menyeluruh bahwa melakukan transaksi dengan agen kami aman dan dapat dipercaya karena terdokumentasi dengan baik secara elektronik di sistem perbankan, dan bank kami merupakan entitas pemerintah. Kegiatan penjangkauan tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan nasabah terhadap agen kami, sehingga membuat mereka memahami fungsinya setara dengan cabang. Namun, upaya ini biasanya memerlukan biaya besar dan melibatkan pelaksanaan yang rumit.”

SVP Perbankan Segmen Mikro, Indonesia

## Dukungan Pemerintah dan Layanan Keuangan Telah Menjangkau Masyarakat Perdesaan namun Untuk Mewujudkan Implementasi yang Efektif Memerlukan Kampanye Komunikasi dan Pendidikan yang Lebih Baik

Analisis kami menggarisbawahi keberhasilan program bantuan tunai bersyarat (PKH) dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dari pemerintah dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil.<sup>13</sup> PKH, melalui sasaran bantuan tunai kepada keluarga berpenghasilan rendah, khususnya perempuan, memenuhi berbagai kebutuhan, memberikan hasil positif dalam kondisi perekonomian, layanan kesehatan, dan pendidikan. Demikian pula pembiayaan UMi, yang memberikan pinjaman minimum kepada usaha kecil, terbukti bersifat transformatif dengan menawarkan modal yang sebelumnya tidak dapat diakses, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan penjualan di masyarakat terpencil.<sup>14</sup> Namun, tantangan dalam mengomunikasikan program



Di Sulawesi Utara, nelayan pada umumnya menggunakan WhatsApp dan Facebook untuk menjual hasil tangkapan mereka. Apabila, di masa depan, pemerintah ingin mendorong nelayan untuk menggunakan e-commerce (perdagangan secara elektronik) untuk berjualan, [kampanye komunikasi dapat mencakup] entitas seperti wirausahawan ikan yang berbagi keberhasilan pengalaman mereka dalam memanfaatkan e-commerce untuk penjualan ikan. [Upaya komunikasi dan edukasi] juga dapat berbagi kesaksian yang menekankan pentingnya mengaktifkan rekening bank sebagai sarana untuk melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan bisnis. Misalnya, penggunaan rekening bank membangun kepercayaan pembeli, dan nelayan dapat memanfaatkan data transaksi untuk pencatatan yang lebih teratur.”

Seorang penggiat program masyarakat pesisir, Indonesia

pemerintah yang mendorong inklusi keuangan, seperti terungkap dalam wawancara dengan para ahli di masyarakat pesisir, menunjukkan adanya kesenjangan kesadaran di kalangan nelayan dan staf cabang bank di daerah perdesaan. Hal ini menekankan kebutuhan mendesak akan kampanye komunikasi yang lebih baik, melalui komunikasi dan edukasi yang berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan program.

Berdasarkan pemahaman ini, analisis kami menggali hubungan positif antara perempuan dalam kepemimpinan desa dan jumlah agen bank di desa, dengan menekankan beragam kontribusi pemimpin perempuan terhadap pembangunan masyarakat perdesaan di Indonesia (Lihat Kotak 4). Beberapa investigasi menyoroti hubungan yang menguntungkan antara kepemimpinan perempuan dan pengembangan masyarakat: Cherotich (2022) mengidentifikasi pengaruh signifikan pemimpin perempuan terhadap pemberdayaan ekonomi melalui tindakan seperti penerapan kebijakan, program peningkatan pendapatan, pembangunan kapasitas, dan dukungan keuangan. Temuan ini menunjukkan bahwa jaringan sosial yang kuat dari para pemimpin perempuan berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas kredit dan perluasan jaringan agen bank. Hal ini dicapai dengan menyebarkan informasi mengenai pilihan kredit, membangun kepercayaan dalam masyarakat, dan menginspirasi para perempuan untuk mengambil peran sebagai agen bank.

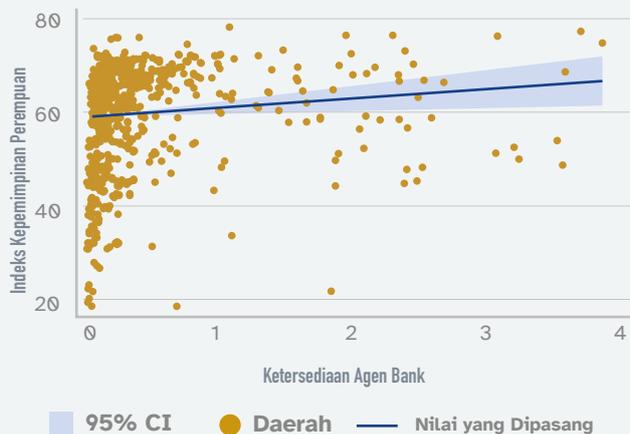
13. Program PKH, atau Program Keluarga Harapan, adalah program bantuan tunai bersyarat yang mencakup memastikan bahwa perempuan hamil menerima perawatan kehamilan, dan 88% penerima bantuan pemerintah tinggal di daerah perdesaan.

14. Harvard Business Review, 2023. How Ultra Micro Holding Connects Finance to Millions in Indonesia

## KOTAK 4. Dampak Kepemimpinan Perempuan terhadap Inklusi Keuangan Perdesaan di Indonesia

Dengan menggunakan data sensus nasional, analisis kami menunjukkan adanya hubungan positif antara perempuan dalam kepemimpinan desa dan jumlah agen bank di desa, yang menekankan beragam kontribusi pemimpin perempuan terhadap pembangunan masyarakat perdesaan di Indonesia.

### GAMBAR 7. BAGAIMANA PEREMPUAN DALAM PERAN KEPEMIMPINAN MEMENGARUHI AKSES DI DESA



**Catatan:** Metodologi penelitian ini melibatkan penyusunan indeks untuk mengukur kepemimpinan perempuan dengan mempertimbangkan tiga indikator utama: perempuan sebagai Kepala Desa, perempuan sebagai Sekretaris Desa, dan partisipasi perempuan dalam badan musyawarah desa. Agen bank mewakili ketersediaan layanan tersebut di setiap desa. Data tersebut ditransformasikan ke tingkat kabupaten. Penelitian ini menggunakan Analisis Komponen Utama Polikorik untuk membangun indeks dan penghitungan skor gabungan. Skor gabungan ini berfungsi sebagai indeks Kepemimpinan Perempuan dan Agen Bank, yang memberikan ukuran kuantitatif mengenai sejauh mana kepemimpinan perempuan memengaruhi jumlah agen bank. Kami juga menemukan bahwa desa-desa dengan pemimpin perempuan memiliki kehadiran agen bank sebanyak 2,5 kali lebih besar.

Temuan ini menunjukkan bahwa kuatnya jaringan sosial para pemimpin perempuan berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas kredit dan perluasan jaringan agen bank. Hal ini dicapai dengan menyebarkan informasi mengenai pilihan kredit, membangun kepercayaan dalam masyarakat, dan menginspirasi perempuan untuk mengambil peran sebagai agen bank.



Di Desa Maginti (Kabupaten Muna Barat – Sulawesi Tenggara), istri kepala desa berperan sebagai agen bank dan menginisiasi kelompok simpan pinjam. Ia menyadari adanya nilai tambah dari kegiatan-kegiatan ini bagi desanya dan memahami bahwa kemajuan di desanya akan mendapat lebih banyak perhatian baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Selain itu, ia mengakui pentingnya program pemerintah yang mengalir melalui rekening bank dan menyelaraskannya dengan partisipasi aktif dalam program inklusi keuangan bagi komunitasnya.”

Pakar Gender dan Inklusi Keuangan, Indonesia

## Rekomendasi

### Pendekatan Holistik untuk Meningkatkan Akses Keuangan dan Inklusi Berkualitas bagi Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani

## 1. Memperkuat Faktor Penggerak melalui Kolaborasi Antarpemangku Kepentingan

Di lanskap yang sering diabaikan di wilayah terpencil, di mana isolasi geografis dan keterbatasan infrastruktur menghambat akses keuangan, pendekatan kolaboratif muncul sebagai kunci untuk membuka potensi ekonomi perempuan dan wirausahawan di masyarakat-masyarakat tersebut. Temuan-temuan yang dirinci di atas berfungsi untuk memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan tentang tantangan unik yang dialami perempuan pada ujung jangkauan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan harus mempertimbangkan penerapan upaya inklusi keuangan berikut ini di wilayah-wilayah tersebut:

**Laboratorium Konsumen**, yang merupakan ide baru dan inovatif yang semakin populer, merupakan alat penting yang digunakan untuk berkolaborasi. Laboratorium ini menyelidiki secara menyeluruh preferensi dan kebutuhan masyarakat yang berada di wilayah terpencil, dan berfungsi sebagai ruang dinamis untuk mengumpulkan data dari tingkat akar rumput. Laboratorium konsumen sangat terlibat dengan pengalaman sehari-hari para petani dan nelayan, sehingga mereka dapat mengumpulkan wawasan yang sangat berharga. Laboratorium ini juga menjadi platform partisipatif, yang memungkinkan anggota masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan, aspirasi, dan tantangan finansial mereka. Hasil dari laboratorium ini lebih dari sekadar analisis statistik, melainkan pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk ekosistem keuangan di daerah terpencil.

Peran laboratorium konsumen lebih dari sekadar pengumpulan data; laboratorium tersebut menjadi ruang untuk ide dan kreasi bersama. Para pemangku kepentingan dapat secara kolaboratif merancang produk dan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Pendekatan akar rumput ini mendorong inklusivitas, memastikan bahwa solusi keuangan yang dikembangkan tidak hanya dapat diakses tetapi juga selaras dengan beragam realitas masyarakat ini. Wawasan yang diperoleh dari laboratorium konsumen



memberikan informasi keputusan kebijakan, menyempurnakan strategi pengembangan produk, memandu kampanye pemasaran yang ditargetkan, dan mendorong inisiatif penelitian yang berkelanjutan. Intinya, laboratorium konsumen menjadi pusat pembangunan partisipatif yang dinamis, memberdayakan masyarakat di wilayah terpencil untuk membentuk layanan keuangan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia telah menginisiasi pembentukan Layanan Usaha Terpadu (PLUT KUMKM) yang bertujuan untuk menumbuhkan ekosistem usaha yang mendukung di seluruh daerah. Selaras dengan Keputusan Presiden No. 2/2022, dengan fokus pada Kewirausahaan Nasional, inisiatif ini mengintegrasikan model inkubasi, dengan PLUT sebagai pusat pendampingan. PLUT juga memberikan konsultasi untuk tugas-tugas seperti permohonan izin usaha dan bertindak sebagai pasar dan pusat pertemuan bagi pembeli dan penjual UMKM. Memasukkan laboratorium konsumen ke dalam pusat-pusat ini dapat meningkatkan dampaknya, mendorong lebih banyak wirausaha dan membentuk kembali lanskap ekonomi dengan memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah serta mendorong pertumbuhan mereka dengan dukungan keuangan formal.

**Investasi Publik** memainkan peran penting dalam upaya kolaboratif ini. Memastikan transportasi umum yang nyaman, akses internet yang terjangkau, dan pusat perekonomian yang layak merupakan hal yang penting untuk memfasilitasi akses dan penggunaan layanan keuangan formal bagi perempuan di wilayah yang kurang atau belum terlayani. Di beberapa masyarakat, organisasi atau koperasi setempat

mengoperasikan layanan antar-jemput masyarakat, yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus seperti transportasi ke pasar, sekolah, atau fasilitas kesehatan.<sup>15</sup> Memperluas platform digital pemesanan kendaraan hingga ke wilayah-wilayah terpencil akan meningkatkan aksesibilitas, sehingga perempuan dapat memesan transportasi melalui aplikasi seluler. Membangun transportasi yang aman melibatkan

**GAMBAR 8. MENGHUBUNGKAN TITIK-TITIK: INFRASTRUKTUR UNTUK LAYANAN KEUANGAN YANG LEBIH BAIK BAGI KONSUMEN YANG KURANG TERLAYANI DAN BELUM TERLAYANI**

Hambatan terkait Infrastruktur	Rekomendasi Kebijakan	Contoh Ukuran Keberhasilan
<b>Keterbatasan Transportasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur transportasi umum setempat</li> <li>Menerapkan langkah-langkah keamanan pada transportasi umum</li> <li>Memperkenalkan dan mempromosikan pilihan transportasi alternatif, terjangkau, dan aman bagi perempuan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya penggunaan transportasi umum meningkat</li> <li>Umpan balik dari masyarakat mengenai langkah-langkah keselamatan, dan</li> <li>Berkurangnya ketergantungan pada sepeda motor untuk mobilitas perempuan</li> </ul>
<b>Biaya Transportasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendukung kebijakan untuk mengendalikan dan menstabilkan harga bensin</li> <li>Membangun inisiatif transportasi berbasis masyarakat</li> <li>Memberikan subsidi biaya operasional angkutan umum bagi masyarakat di daerah terpencil dan memperkenalkan e-money (uang elektronik) sebagai fitur pembayaran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya beban keuangan bagi individu yang mengakses layanan keuangan</li> <li>Meningkatnya pemanfaatan transportasi berbasis masyarakat, dan</li> <li>Menurunnya biaya perjalanan yang dilaporkan oleh individu di daerah terpencil</li> </ul>
<b>Masalah Keamanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatkan infrastruktur keamanan di daerah dengan penerangan yang buruk</li> <li>Meningkatkan kehadiran polisi dan menerapkan pemolisian masyarakat di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi</li> <li>Menerapkan langkah-langkah keamanan di lembaga keuangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berkurangnya laporan terkait masalah keamanan,</li> <li>Meningkatnya pemanfaatan layanan di wilayah dengan penerangan buruk, dan</li> <li>Umpan balik masyarakat mengenai peningkatan langkah-langkah keselamatan di lembaga keuangan</li> </ul>
<b>Kualitas Infrastruktur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berinvestasi dalam peningkatan kualitas jalan dan fasilitas umum</li> <li>Memastikan infrastruktur yang mudah diakses dan dipelihara dengan baik di sekitar lembaga keuangan</li> <li>Menerapkan langkah-langkah untuk membuat lembaga keuangan dapat diakses secara fisik, termasuk jalan landai dan elevator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Umpan balik masyarakat mengenai peningkatan infrastruktur</li> <li>Menurunnya waktu dan biaya perjalanan yang dilaporkan oleh pengguna</li> <li>Meningkatnya aksesibilitas ke lembaga keuangan, dan</li> <li>Meningkatnya laporan terkait kemudahan akses bagi penyandang disabilitas fisik</li> </ul>

15. UN Pulse menawarkan survei "After Dark" (setelah hari gelap) tentang apa yang dianggap "aman" oleh perempuan dalam bidang transportasi. Lihat Almuna et al (2019).



inisiatif seperti meningkatkan perilaku pengemudi penyedia layanan, menawarkan subsidi untuk rute tertentu malam hari, membangun ruang tunggu yang aman, mengarahkan personel keamanan jalanan, dan mengembangkan aplikasi digital yang memenuhi keselamatan perempuan.<sup>16</sup> Melalui penilaian berkelanjutan terhadap berbagai indikator keberhasilan, beragam investasi dalam infrastruktur publik menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya inklusi keuangan. Dengan demikian, perempuan memiliki lebih banyak sumber daya dan peluang untuk pertumbuhan ekonomi (Gambar 8).

Perjalanan menuju inklusi keuangan memerlukan upaya bersama dalam kemitraan yang kolaboratif antarpemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Kemitraan semacam ini dapat membantu mengidentifikasi dan menyoroti area-area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Pembuat kebijakan dapat memperoleh wawasan mendalam untuk menentukan inisiatif yang tepat sasaran di tingkat nasional melalui kolaborasi dengan masyarakat setempat serta dengan dukungan penelitian dan data. Pertemuan rutin dengan perwakilan dari berbagai sektor menjadi forum untuk mendiskusikan tantangan, berbagi praktik terbaik, dan menentukan agenda bersama. Menetapkan indikator keberhasilan yang terukur dengan jadwal yang disepakati akan memastikan akuntabilitas dan penilaian kemajuan. Salah satu contohnya adalah Advokasi Hub Inklusi Keuangan Digital Perempuan yang beranggotakan perwakilan dari penyedia jasa keuangan, organisasi akar rumput, dan pemerintah yang bekerja untuk mempercepat inklusi keuangan perempuan. Tujuan dari keterlibatan masyarakat setempat adalah untuk menciptakan pendekatan yang efisien, berpusat pada manusia, dan terukur yang menjangkau berbagai generasi, dan memberikan manfaat bagi perempuan dan masyarakat rentan (Lampiran C, Gambar 14).

16. UN Pulse menawarkan survei "After Dark" (setelah hari gelap) tentang apa yang dianggap "aman" oleh perempuan dalam bidang transportasi. Lihat Almuna et al (2019).

## 2. Memperluas Desain Produk dan Layanan yang Sesuai untuk Perempuan dan Masyarakat Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani

**GAMBAR 8.1. UNTUK MEMPERLUAS PRODUK DAN LAYANAN YANG DIRANCANG UNTUK PEREMPUAN PERDESAAN YANG KURANG TERLAYANI DAN BELUM TERLAYANI, PEMERINTAH, PENYEDIA JASA KEUANGAN, DAN PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA HARUS FOKUS PADA EMPAT BIDANG**



Bagian ini menampilkan beberapa strategi desain produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan perempuan perdesaan:

### Membuat Kredit Dapat Diakses dan Tersedia serta Pembuatan Riwayat Tabungan

Bagi perempuan di perdesaan, memiliki rekening tabungan lebih dari sekadar tempat menyimpan uang. Rekening tabungan berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan sumber keuangan, meningkatkan kemampuan untuk menghadapi pengeluaran tak terduga. Karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran tentang fakta bahwa tabungan tidak hanya terbatas pada bank tradisional, terutama pada ekonomi informal yang ditemukan di masyarakat terpencil. Tantangannya terletak pada bagaimana meningkatkan kesadaran ini sehingga perempuan beralih dari penyedia jasa keuangan informal ke penyedia jasa keuangan formal.

Hal yang tidak kalah penting adalah menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya memelihara catatan sejarah keuangan. Meskipun banyak masyarakat di wilayah terpencil yang melakukan pekerjaan informal, riwayat keuangan yang tercatat ini dapat dimanfaatkan oleh penyedia jasa keuangan sebagai bukti pendapatan yang konsisten dan terdokumentasi. Penelitian kami menyoroti kebutuhan penting untuk menyesuaikan metodologi penilaian kredit dengan keadaan unik masyarakat ini: Secara khusus, penilaian kredit harus memperhitungkan

pola pendapatan tidak teratur yang umum terjadi pada pekerja informal harian, seperti nelayan dan pedagang, yang bergantung pada transaksi tunai. Selain itu, pertimbangan terhadap siklus pertanian dan musim panen, yang melampaui periode penilaian konvensional yang biasanya hanya tiga bulan, sangatlah penting. Mengakui nuansa-nuansa ini sangatlah penting, karena model penilaian kredit konvensional mungkin terbukti tidak memadai dalam mengatasi beragam tantangan yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah terpencil.

### Memanfaatkan Kekuatan Asuransi

Asuransi risiko iklim dapat menjadi penyelamat bagi masyarakat terpencil, khususnya bagi mereka yang bergantung pada mata pencaharian yang sensitif terhadap perubahan iklim seperti pertanian. Kerentanan yang melekat pada wilayah-wilayah tersebut terhadap tantangan-tantangan yang disebabkan oleh iklim, mulai dari peristiwa cuaca ekstrem hingga kekeringan dan banjir, sering kali mengakibatkan kemunduran ekonomi yang besar bagi masyarakat tersebut. Kegagalan panen, hilangnya ternak, dan kerusakan harta benda dapat sangat mengganggu penghidupan; asuransi risiko iklim dapat berfungsi sebagai jaring pengaman finansial yang penting dalam skenario seperti ini. Dengan memberikan kompensasi kepada individu atas kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa terkait iklim, bentuk asuransi ini dapat memfasilitasi proses pemulihan yang lebih cepat, sehingga mengurangi risiko masyarakat tersebut mengalami kemiskinan ekstrem.



Dalam konteks wilayah terpencil di mana pekerja informal, khususnya petani dan nelayan, mendominasi sektor ekonomi, produk asuransi yang disesuaikan dengan kebutuhan merupakan suatu keharusan. Penyedia asuransi dapat bekerja sama dengan jaminan sosial yang sudah ada seperti asuransi kesehatan semesta untuk penerima nonupah (BPJS Ketenagakerjaan Bukan Penerima Upah) dan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).<sup>17</sup> Upaya kolaboratif, termasuk paket kemitraan dan asuransi bersama, dapat meningkatkan pertanggungjawaban secara komprehensif. Untuk mendorong penerapan solusi asuransi terpadu tersebut, pertimbangan untuk subsidi premi dan insentif dapat dimanfaatkan untuk membuat asuransi lebih terjangkau bagi para pekerja informal. Yang terpenting, memperluas pilihan asuransi pertanian memerlukan penyesuaian yang kuat antara kebijakan dan peraturan untuk memastikan efektivitas integrasi dari asuransi risiko iklim ke dalam jaring pengaman keuangan yang lebih luas yang tersedia bagi masyarakat di wilayah terpencil.

### Memasukkan Model Digital sebagai Katalis bagi Inklusi Keuangan Perempuan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani

Studi kami menggarisbawahi tantangan berat yang dihadapi perempuan di wilayah terpencil ketika mencoba mengakses layanan perbankan tradisional. Kebutuhan melakukan perjalanan jarak jauh tidak hanya menyita waktu yang berharga namun juga menimbulkan beban fisik dan logistik yang signifikan. Salah satu keuntungan utama dari transaksi *mobile* adalah akses instan terhadap dana. Kesegeraan ini sangat kontras dengan penundaan yang dialami dalam

sistem perbankan tradisional, yang dapat menimbulkan ketidakpastian keuangan bagi perempuan di daerah-daerah yang kurang terlayani. Peralihan ke model digital adalah pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan unik yang dihadapi perempuan di masyarakat-masyarakat terpencil. Model ini mengintegrasikan elemen fisik dan digital dengan mulus, dengan mengakui beragam preferensi dan masalah kepercayaan yang lazim terjadi di daerah tersebut. Dengan menawarkan interaksi tatap muka, model digital menumbuhkan kepercayaan dan melayani individu yang mungkin masih enggan mengadopsi solusi digital sepenuhnya. Dalam ranah inklusi keuangan, khususnya di daerah-daerah yang memiliki masalah konektivitas dan kegiatan ekonomi musiman, model digital berfungsi sebagai penghubung yang menawarkan layanan keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat terpencil.

Pendekatan digital sangat relevan di Indonesia, di mana masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil terlibat dalam kegiatan seperti pertanian dan perikanan. Model ini menyadari pentingnya transisi bertahap menuju digitalisasi, yang memungkinkan individu untuk memulai dengan metode yang sudah dikenal lebih dahulu, dan secara bertahap merangkul layanan digital seiring dengan bertambahnya kepercayaan diri mereka. Selain itu, model digital mendukung upaya literasi keuangan dengan memberikan panduan yang dipersonalisasi melalui interaksi langsung, sehingga berkontribusi terhadap ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan responsif. Secara keseluruhan, model digital siap memainkan peran penting dalam mengalihkan nasabah yang kurang terlayani dan belum terlayani menuju layanan keuangan formal yang inklusif.<sup>18</sup>

17. BPJS Ketenagakerjaan merupakan bagian dari sistem jaminan sosial yang lebih luas di Indonesia dan berperan penting dalam menjamin kesejahteraan dan perlindungan pekerja di berbagai sektor ketenagakerjaan. Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap para petani melalui perjanjian antara petani dan perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko pada usaha pertanian khususnya pertanian padi.

18. Jain, D., & Bfsi, E. (22 Mei 2022). Phygital model to drive the next phase of financial inclusion. <https://bfsi.economicstimes.indiatimes.com/blog/phygital-model-to-drive-the-next-phase-of-financial-inclusion/91638109>.



#### KOTAK 5. Membangun Kasus Bisnis untuk Melayani Daerah Perdesaan: Penggunaan Data Ponsel dalam Inklusi Keuangan Jarak Jauh

Pentingnya data ponsel dalam strategi inklusi keuangan mempunyai potensi untuk menjelaskan pola mobilitas manusia, jaringan sosial, dan korelasinya dengan pembangunan ekonomi serta penggunaan dan akses keuangan. Namun, kurangnya pemanfaatan sumber daya yang berharga ini dalam upaya inklusi keuangan yang ada menunjukkan hilangnya peluang untuk mencapai hasil yang bermakna. Mengatasi tantangan yang terkait dengan pengintegrasian data ponsel yang kaya dengan informasi sosio-ekonomi yang langka memerlukan inovasi metodologis dan pertimbangan bias yang cermat, sehingga membuka potensi yang belum dimanfaatkan dari sumber data ini.

Pada bulan Mei 2022, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memperkenalkan BRIKodes, sebuah strategi digital yang memetakan 97% desa

dan kelurahan, yang menekankan pentingnya membangun data digital di daerah perdesaan. Dengan memberikan kode unik pada unit administratif, BRI memperoleh wawasan berharga mengenai kepadatan kepemilikan ponsel cerdas, perilaku ekonomi, dan aktivitas di berbagai wilayah. Aplikasi BRIKodes berfungsi sebagai alat yang netral, yang menawarkan profil inklusi dan informasi layanan keuangan terperinci untuk seluruh desa di bawah payung BRI. Dengan data yang kaya, BRI dapat menyesuaikan layanan keuangan untuk memenuhi kebutuhan unik setiap daerah, sehingga berkontribusi terhadap tujuan mereka mencapai 90% inklusi keuangan pada tahun 2024. Sebagai studi kasus, BRIKodes memberikan contoh pragmatis bagi lembaga keuangan lain yang ingin memenuhi kebutuhan di daerah-daerah yang kurang terlayani dalam memanfaatkan data seluler untuk inklusi keuangan daerah terpencil.

## Mempromosikan Peran Agen Bank yang Beragam

Mempromosikan peran agen bank yang beragam bank di daerah-daerah terpencil sangat penting untuk memperluas inklusi keuangan. Banyak agen bank di daerah ini berasal dari latar belakang pendidikan yang beragam dan sering menghadapi tantangan dalam memahami fitur-fitur aplikasi agen karena keterbatasan pemahaman terhadap teknologi. Menyadari hal ini, lembaga keuangan perlu berinvestasi dalam pelatihan tambahan untuk meningkatkan kapasitas para agen. Hal ini mencakup membekali para agen untuk berperan sebagai teller dan perwakilan layanan pelanggan, sehingga memerlukan pemahaman mendalam dan penjelasan efektif mengenai produk keuangan, sistem teknis, dan kemampuan untuk memberikan pendidikan dan saran langsung mengenai produk yang cocok bagi nasabah.

Potensi agen bank lebih dari sekadar memfasilitasi transaksi QRIS. Mereka dapat berkembang menjadi pendidik keuangan yang berharga, yang dapat berkontribusi terhadap penyebaran literasi keuangan di masyarakat-masyarakat di wilayah terpencil. Selain transaksi sederhana, agen bank juga dapat memfasilitasi kredit dan pinjaman, menyediakan layanan asuransi mikro, dan bahkan bertindak sebagai saluran distribusi manfaat pemerintah. Selain itu, dengan berkolaborasi dengan, misalnya, platform e-commerce, para agen ini dapat memperluas penawaran layanan mereka, melakukan penjualan silang berbagai produk keuangan untuk memenuhi beragam kebutuhan. Agen bank yang menyelenggarakan acara komunitas juga memainkan peran penting dalam meningkatkan literasi keuangan, memposisikan mereka tidak hanya sebagai fasilitator transaksi, tetapi juga sebagai kontributor penting dalam pengembangan peluang pendapatan yang berkelanjutan bagi mereka sendiri.

Meningkatkan efektivitas agen keuangan di daerah terpencil memerlukan beragam pendekatan. Mengizinkan agen bekerja di banyak bank, khususnya di lokasi terpencil, dapat memperluas aksesibilitas layanan keuangan secara signifikan. Kolaborasi antarbank ini dapat dilengkapi dengan inisiatif untuk meningkatkan daya saing agen, seperti penerapan papan peringkat atau pemberian penghargaan kepada agen dengan kinerja terbaik. Menciptakan lingkungan yang kompetitif tidak hanya memotivasi agen tetapi juga meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Selain itu, sistem insentif juga perlu dipertimbangkan kembali, untuk memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mendorong keterlibatan agen. Sebagai contoh,



memperkenalkan insentif untuk kasus-kasus penggunaan yang inovatif, seperti konsep “Save Your Change” (Simpan Kembali Anda), seperti yang ditampilkan dalam kampanye Tabunginaja<sup>19</sup>, dapat memberikan struktur insentif yang kuat dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mendorong agen keuangan tetapi juga menyelaraskan upaya mereka dengan kebutuhan khusus masyarakat setempat, sehingga memastikan strategi inklusi keuangan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan yang beragam ini selaras dengan kebutuhan unik daerah-daerah yang kurang terlayani, memastikan bahwa layanan keuangan menjangkau lebih dari hal-hal mendasar, dan menjawab berbagai kebutuhan keuangan di masyarakat-masyarakat tersebut. Dengan mengubah agen bank menjadi penyedia layanan keuangan holistik, strategi ini tidak hanya berkontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi nasabah di perdesaan namun juga memperkuat keberlanjutan aliran pendapatan bagi para agen itu sendiri.

Mengingat pentingnya masalah likuiditas, terutama di daerah perdesaan di mana transaksi tunai merupakan hal yang umum terjadi, sebuah rekomendasi kebijakan diusulkan kepada OJK, untuk mempertimbangkan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan likuiditas agen dan membangun kepercayaan terhadap layanan keuangan formal. Di daerah-daerah di mana transaksi tunai lazim dilakukan dan layanan masyarakat bergantung pada satu agen, OJK dapat mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan likuiditas yang optimal, terutama selama periode puncak seperti hari gaji atau hari pembagian tunjangan. Menggunakan solusi berbasis teknologi untuk memantau dan memprediksi permintaan uang tunai dapat meningkatkan efisiensi. Mengoptimalkan operasi melalui peningkatan teknologi dan pemanfaatan data berpotensi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas layanan.

19. <https://medium.com/pulse-lab-jakarta/key-lessons-from-trialling-our-tabunginaja-justsaveit-behavioural-intervention-campaign-for-ad1746050e9c>

### 3. Memanfaatkan Para Pemimpin Perempuan dan Generasi Muda sebagai Bagian dari Inisiatif Inklusi Keuangan Digital di Masyarakat Perdesaan



Perempuan dan masyarakat perdesaan yang kurang terlayani dan belum terlayani menghadapi hambatan keuangan yang signifikan karena terbatasnya pemahaman mereka terhadap layanan keuangan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi yang komprehensif, dengan fokus pada penyesuaian pendidikan keuangan, praktik pemberian pinjaman yang bertanggung jawab, dan pengembangan model digital. Pada saat yang sama, harus diarahkan upaya penerapan langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan program literasi digital untuk memastikan penggunaan platform keuangan online yang aman.

Memanfaatkan pemimpin perempuan sebagai bagian dari inisiatif inklusi keuangan digital adalah suatu keharusan berdasarkan sejumlah penyelidikan yang menyoroti pengaruh mereka yang signifikan dalam pembangunan masyarakat. Cherotich (2022) menyoroti bagaimana pemimpin perempuan membantu memberdayakan masyarakat secara ekonomi melalui kebijakan, program, dan dukungan. Jaringan sosial mereka yang luas meningkatkan akses ke kredit dan memperluas layanan bank dengan membagikan informasi penting dan membangun kepercayaan. Data dari Podes mengonfirmasi hal ini, menunjukkan bahwa desa-desa yang dipimpin oleh perempuan memiliki layanan perbankan 2,5 kali lebih banyak. Hal ini menekankan pentingnya memanfaatkan jaringan pemimpin perempuan untuk membuat inisiatif inklusi keuangan lebih efektif.

Selain itu, generasi muda, mengingat kemahiran mereka dalam menggunakan perangkat digital, dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan teknologi yang mungkin ada di antara penduduk yang lebih tua di masyarakat perdesaan. Generasi muda dapat bertindak sebagai mediator dan pendidik, dan memfasilitasi integrasi generasi yang lebih tua ke dalam

ekosistem keuangan formal. Pendekatan antargenerasi ini dapat mempercepat adopsi layanan keuangan serta memastikan bahwa solusi yang dikembangkan peka terhadap budaya dan selaras dengan perspektif dan konvensi unik yang ada di masyarakat perdesaan.

Duta kaum muda dan perempuan dapat berkontribusi terhadap inklusi keuangan melalui pengaruh antarteman, advokasi digital, memimpin kampanye pendidikan, dan menumbuhkan kepekaan budaya. Mereka dapat berperan sebagai penyampai pesan, menyebarkan informasi, berbagi kisah keberhasilan, dan menghilangkan kesalahpahaman tentang layanan keuangan formal. Kemahiran mereka dalam platform digital memungkinkan mereka melakukan advokasi inklusi keuangan secara efektif. Kesadaran mereka terhadap tradisi setempat memastikan bahwa inisiatif sejalan dengan norma budaya, sehingga meningkatkan efektivitasnya.

Pusat inovasi atau platform daring yang dipimpin oleh kaum muda dapat berfungsi sebagai ruang kolaborasi untuk pertukaran gagasan, menumbuhkan kreativitas dan solusi lokal. Inisiatif yang dipimpin oleh kaum muda dapat mencakup program pengembangan keterampilan atau mengajarkan keterampilan praktis seperti penganggaran dan pengelolaan keuangan digital. Selain itu, duta kaum muda dapat memperkuat suara kelompok yang kurang terlayani, dengan mendesak pembuat kebijakan untuk merancang peraturan yang inklusif. Kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk lembaga keuangan, LSM, dan usaha setempat, dapat semakin meningkatkan dampak inisiatif yang dipimpin oleh kaum muda, sehingga menciptakan lanskap keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah yang sering kali kurang terlayani atau belum terlayani oleh layanan keuangan formal. (lihat Lampiran D, Gambar 14).

## Kesimpulan: Melibatkan Perempuan sebagai Ujung Tombak Keuangan di Indonesia



Perempuan di perdesaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Mereka menghadapi sengkang layanan keuangan yang berbelit-belit dan sering kali tidak terdistribusi dengan baik, sehingga mengakibatkan kesenjangan yang signifikan dalam hal aksesibilitas bagi banyak orang. Oleh karena itu, perempuan menggunakan beragam strategi untuk mengelola keuangan mereka, melindungi diri dari risiko, dan memanfaatkan peluang yang ada. Tantangan lingkungan seperti mobilitas, akses internet, dan kemampuan dasar keuangan digital masih terus berlanjut, sehingga menyebabkan rendahnya penggunaan layanan keuangan formal.

Namun demikian, terlihat indikator-indikator yang menjanjikan - infrastruktur publik digital membaik, inisiatif pemerintah yang kuat, dan kepemimpinan perempuan, contohnya - menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki banyak elemen yang diperlukan untuk meningkatkan akses layanan keuangan di perdesaan baik bagi perempuan maupun laki-laki. Seiring dengan peningkatan-peningkatan ini, alasan untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi perempuan perdesaan

akan menjadi lebih kuat, sehingga mendorong keterlibatan yang lebih besar dari sektor swasta.

Ketika perempuan, termasuk mereka yang berada di daerah perdesaan, terlibat dengan layanan keuangan, terjadi peningkatan yang terukur dalam pemberdayaan ekonomi mereka (Hindriyani, 2024), yang berarti kontrol yang lebih besar terhadap keputusan keuangan, peningkatan kemandirian finansial, dan peningkatan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Pentingnya upaya terpadu dan solusi inovatif untuk membuka potensi ekonomi daerah perdesaan di Indonesia ditegaskan dengan perlunya memperkuat faktor pendukung (*enabler*) melalui kolaborasi pemangku kepentingan. Dengan menerapkan solusi keuangan yang disesuaikan; memperluas desain produk dan layanan yang sesuai, serta memanfaatkan peran perempuan, agen bank, dan pemuda, para pemangku kepentingan dapat meningkatkan akses keuangan dan mendorong inklusi yang berarti bagi perempuan yang selama ini belum terlayani dan kurang terlayani di seluruh perdesaan di Indonesia.

## Referensi

---

Almuna et al. (2019, Oktober). After dark – Bahasa. <https://www.unglobalpulse.org/document/setelah-gelap-after-dark-bahasa/>

Ashraf, N., Karlan, D., & Yin, W. (2006). Tying Odysseus to the mast: Evidence from a commitment savings product in the Philippines. *The Quarterly Journal of Economics*, 121(2), 635–672. <https://doi.org/10.1162/qjec.2006.121.2.635>

Badan Pusat Statistik (BPS). 20223

Cherotich, B. C. & Njoroge, J. (2022). Women Leadership and Economic Empowerment in Kajiado County, Kenya. *International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering*, 8(6).

Demirgüç-Kunt, A., dkk. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial inclusion, digital payments, and resilience in the age of COVID-19*. World Bank.

The Financial Agency of Indonesian Women. (2021). Last mile money. <https://lastmile.money/>

Hannig, A., & Jansen, S. (2008). *Inclusive financial system reforms: What works, what doesn't, and why? Draf Laporan*. Jakarta: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ).

Harvard Business Review (2023). How Ultra micro holding connects finance to millions in Indonesia. <https://hbr.org/sponsored/2023/12/how-ultra-micro-holding-connects-finance-to-millions-in-indonesia>

Hindriyani, M. (2024). Empowering Indonesia's artisans: Financial inclusion insights. <https://www.womensworldbanking.org/wp-content/uploads/2024/01/Empowering-Indonesias-Artisans.pdf>

IDEO. (2022). Faster product-market fit for digital finance at the last mile. <https://www.financialconfidence.design/last-mile-user>

Jain, D., & ETBSFI (22 Mei 2022). Phygital model to drive the next phase of financial inclusion. <https://bfsi.economictimes.indiatimes.com/blog/phygital-model-to-drive-the-next-phase-of-financial-inclusion/91638109>

Jansson, T. (2001). *Microfinance: From village to Wall Street*. Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/en/publications/english/viewer/Microfinance-From-Village-to-Wall-Street.pdf>

PwC Indonesia. (2019). *Indonesia's fintech lending: Driving economic growth through financial inclusion*. [https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC\\_FintechLendingThoughtLeadership\\_ExecutiveSummary.pdf](https://www.pwc.com/id/en/fintech/PwC_FintechLendingThoughtLeadership_ExecutiveSummary.pdf)

Sarma, M., & Pais, J. (2008). *Financial inclusion and development: A cross country analysis*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Kesetaraan, Inklusi dan Pembangunan Manusia, yang diselenggarakan oleh HDCA dan IHD. <https://www.icrier.org/pdf/Mandira%20Sarma-Paper.pdf>

Tamilarasu, A. (2014). Peran sektor perbankan terhadap pengembangan inklusi keuangan di India: Sebuah analisis. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 272–276.

UN Global Pulse Asia Pasifik. (20 Maret 2020). Pelajaran kunci dari uji coba kampanye intervensi perilaku #TabunginAja (#Just SaveIt) untuk meningkatkan inklusi keuangan. <https://medium.com/pulse-lab-jakarta/key-lessons-from-trialling-our-tabunginaja-justsaveit-behavioural-intervention-campaign-for-ad1746050e9c>

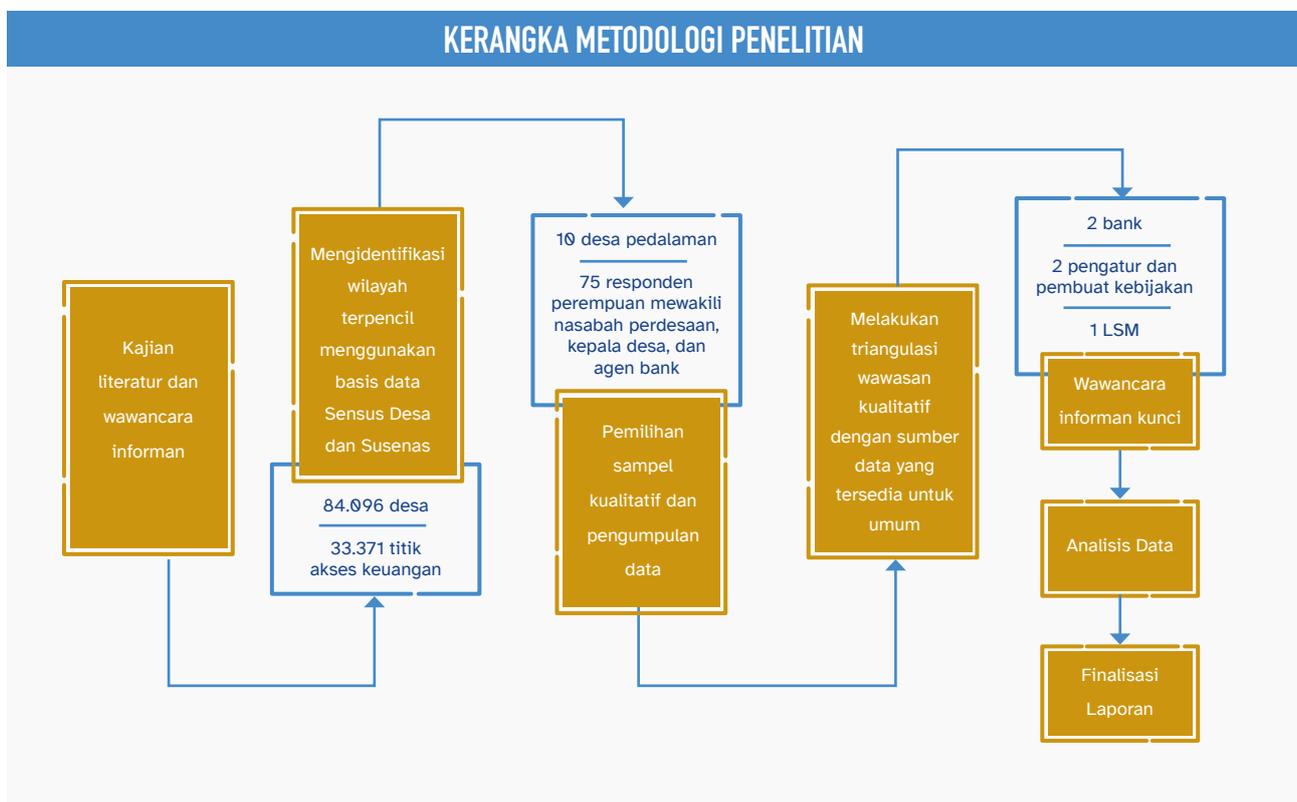
## Lampiran A: Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hibrida deduktif-induktif dengan banyak sumber data. Pada tahap awal penelitian, dilakukan kajian menyeluruh terhadap literatur yang ada mengenai layanan keuangan di daerah perdesaan. Ini melibatkan analisis berbagai studi penelitian, artikel, dan dokumen kebijakan untuk mengidentifikasi isu-isu utama, kesenjangan kebijakan, dan karakteristik yang didukung oleh bukti empiris. Untuk melengkapi tinjauan literatur ini, dilakukan wawancara dengan informan, termasuk para ahli, pembuat kebijakan, dan praktisi. Wawancara-wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan wawasan tambahan, memvalidasi temuan-temuan dari literatur, dan memberikan pemahaman yang berbeda mengenai tantangan dan peluang dalam lanskap layanan keuangan di perdesaan.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi daerah perdesaan dengan menggunakan data dari lembaga

keuangan. Sumber datanya meliputi informasi lokasi bank, pegadaian, dan kantor pos yang diperoleh dari berbagai lembaga keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data geospasial untuk memetakan Titik Akses Keuangan (TAK) dan setiap jenis TAK ditempatkan secara akurat berdasarkan koordinat alamat lengkapnya. Tahapan pra-pengolahan dilakukan untuk memastikan keakuratan nama bank, alamat, kode pos, serta koordinat geodesi lintang dan bujur. Perangkat lunak ArcGIS digunakan untuk memproses data spasial. Data geospasial tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam format peta, sehingga memudahkan pengamatan perubahan dan tren sebaran layanan keuangan di seluruh Indonesia dari waktu ke waktu.

Pada saat yang sama, kami menganalisis basis data resmi seperti data Statistik Potensi Desa (Podes), termasuk data tambahan dari Susenas dan Sakernas. Untuk menganalisis perubahan dari



waktu ke waktu, penelitian ini membandingkan data tahun 2018 dengan data terkini yang tersedia, yaitu tahun 2022. Melalui analisis yang cermat terhadap data tersebut, pola dan karakteristik kawasan perdesaan dapat diidentifikasi. Dengan menggunakan pengategorian data dari 84.090 desa di Indonesia, penelitian ini berfokus pada identifikasi wilayah yang terlayani penuh, kurang terlayani, dan belum terlayani. Kami memilih sepuluh daerah perdesaan melalui sampel responden acak yang terstratifikasi secara geografis untuk wawancara mendalam. Partisipan penelitian berasal dari Kalimantan Timur dan Utara, Kepulauan Maluku dan Maluku, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Metode pengumpulan data kualitatif, seperti wawancara, dan observasi partisipan, digunakan di wilayah-wilayah tersebut untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman dan tantangan layanan keuangan yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Untuk memperkuat validitas dan kedalaman wawasan kualitatif yang diperoleh dari penelitian lapangan, digunakan pendekatan triangulasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai penyedia layanan keuangan, termasuk perwakilan dari bank dan agen bank (12), perusahaan fintech, dan badan pengatur. Dengan melakukan referensi silang atas temuan kami dengan para ahli dan pemain kunci di sektor keuangan dan perbankan, penelitian ini bertujuan untuk memastikan gambaran lanskap

layanan keuangan perdesaan yang komprehensif dan akurat.

Data yang dikumpulkan, baik kualitatif maupun kuantitatif, dianalisis secara cermat. Diterapkan analisis tematik untuk menafsirkan secara kualitatif wawasan yang diperoleh dari wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan observasi partisipan. Pada saat yang sama, juga digunakan analisis statistik untuk mengidentifikasi korelasi dan tren pada data kuantitatif yang diperoleh dari Sensus Desa dan basis data terkait lainnya. Pendekatan ganda ini mempermudah pemahaman yang komprehensif tentang beragam aspek lingkungan layanan keuangan perdesaan.

Berdasarkan analisis data, disusun laporan awal. Draf laporan tersebut telah melalui proses peninjauan yang melibatkan para pemangku kepentingan seperti para ahli, pengambil kebijakan, dan penyedia jasa keuangan. Putaran umpan balik kolaboratif ini memungkinkan terciptanya laporan yang lebih komprehensif dan bernuansa, yang diperkaya oleh beragam perspektif dari pihak-pihak yang terlibat. Dengan menggabungkan umpan balik yang diterima selama proses peninjauan, disiapkan laporan akhir. Hal ini mencakup penyempurnaan konten, mengatasi kesenjangan yang teridentifikasi, dan memastikan dimasukkannya rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.

## Lampiran B: Pendekatan Pengambilan Sampel

Pemilihan desa untuk wawancara mendalam biasanya berpedoman pada prinsip *purposive sampling* (penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu), yang menekankan pemilihan partisipan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan sudut pandang yang

relevan dengan tujuan penelitian. Dengan memilih desa secara cermat, peneliti dapat memperoleh data yang kaya dan bermakna sehingga memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian.

### Untuk penelitian ini, dipertimbangkan beberapa faktor ketika menentukan desa mana yang akan dijadikan sampel:



#### LOKASI

Kami membagi desa-desa tersebut menjadi beberapa wilayah, yaitu **Barat, Tengah,** dan **Timur**, karena kami menyadari bahwa faktor sosial ekonomi, praktik budaya, dan karakteristik geografis sering kali berbeda-beda di setiap wilayah. Dengan memasukkan desa-desa dari setiap wilayah, desain penelitian dapat menangkap beragam sudut pandang yang mungkin ada di lokasi yang berbeda, sehingga memastikan pemahaman yang lebih luas mengenai topik penelitian.



#### AKSES KEUANGAN

Kami mengklasifikasikan desa-desa ke dalam kategori **terlayani penuh, kurang terlayani,** dan **belum terlayani**. Terlayani penuh berarti setidaknya ada satu agen bank atau ATM di desa tersebut, kurang terlayani berarti tidak ada agen bank atau ATM di desa tersebut, namun mudah dijangkau, dan belum terlayani berarti ada agen bank atau ATM di desa tersebut, dan sulit dijangkau.



#### AKSES INTERNET

Dengan mengelompokkan desa ke dalam **masyarakat yang terhubung,** yang mengacu pada masyarakat yang memiliki akses internet, dan **masyarakat yang tidak terhubung,** atau masyarakat yang tidak memiliki akses internet, kami dapat mengeksplorasi potensi pengaruh konektivitas digital terhadap topik penelitian. Perbedaan antara masyarakat yang terhubung dan tidak terhubung memungkinkan peneliti untuk menyelidiki bagaimana akses terhadap informasi, komunikasi, dan peluang ekonomi melalui internet dapat memengaruhi sudut pandang dan perilaku keuangan individu.

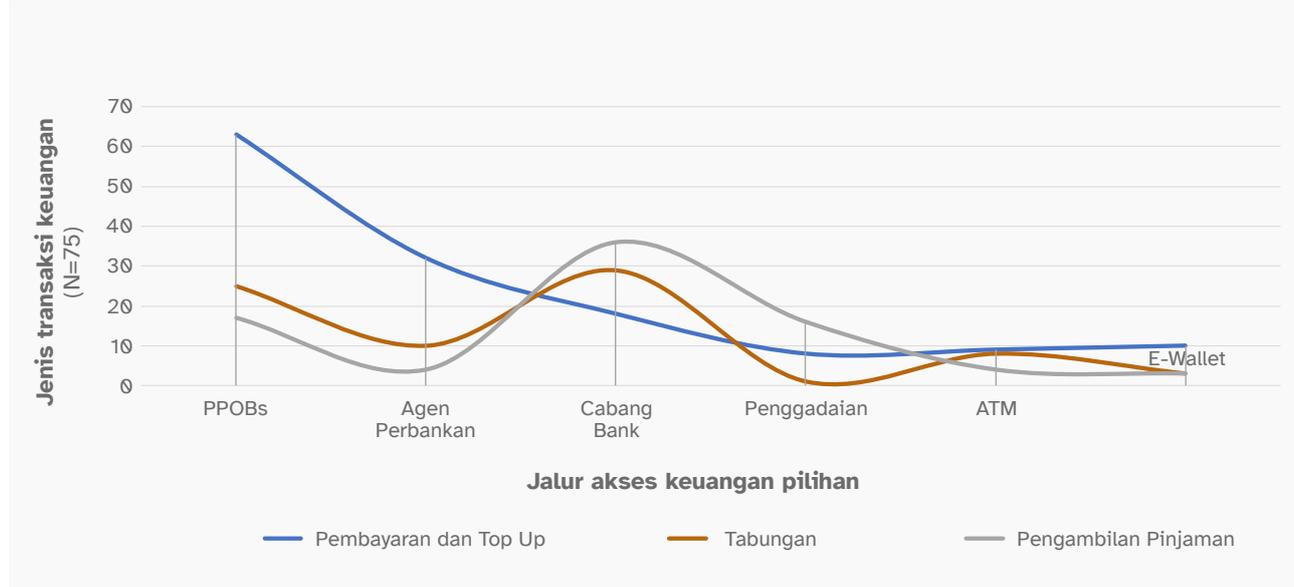


## Lampiran C: Mengidentifikasi Indikator untuk Memetakan Perempuan Perdesaan yang Kurang Terlayani dan Belum Terlayani Secara Finansial

Untuk memilih proksi jarak dari layanan keuangan, pertama-tama kami harus mengidentifikasi layanan keuangan mana yang paling diminati (misalnya, menyimpan uang, mengambil pinjaman, melakukan transaksi pembayaran). Secara keseluruhan, transaksi keuangan formal perempuan perdesaan tampaknya sebagian besar didorong oleh pembayaran dan top-up Over-the-Counter (OTC; metode transaksi dengan pembayaran langsung di tempat), diikuti oleh tabungan dan pinjaman. Untuk transaksi OTC, Bank Payment Point Online (PPOB), seperti PT Pos, Indomaret, dan Alfamart, serta agen perbankan,

tampaknya merupakan jalur akses yang lebih diminati bagi pelanggan di perdesaan.<sup>20</sup> Bagi mereka yang menabung dan/atau mengambil pinjaman, cabang bank, Pegadaian, dan PPOB merupakan jalur akses pilihan mereka (lihat Gambar 9). Berdasarkan data tersebut, kami memetakan pertumbuhan titik akses cabang bank, ATM, Pegadaian, dan PT Pos. Kemudian kami menghitung indeks yang mencerminkan jumlah titik layanan keuangan di suatu wilayah tertentu relatif terhadap jumlah penduduknya (metode kontainer), yaitu rasio kepadatan layanan (lihat Gambar 3, Gambar 10 dan Gambar 11).

**GAMBAR 9. PILIHAN TITIK AKSES KEUANGAN**



**Sumber:** Wawancara penulis dengan nasabah perempuan di wilayah pengambilan sampel (N=75). Responden ditanya, “Transaksi keuangan formal apa yang paling sering Anda lakukan?” dan “Kemana biasanya Anda pergi untuk melakukan transaksi tersebut?” Wawancara mengandalkan umpan balik peserta, tanpa petunjuk yang mengarahkan jawaban mereka.

20. **Payment Point Online Bank (PPOB)** adalah sistem layanan pembayaran online yang biasa dioperasikan oleh penyedia utilitas (penyedia listrik/air, operator jaringan seluler) yang bekerja sama dengan lembaga perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, startup/pengelola fintech (teknologi keuangan) dan e-commerce juga mulai menyediakan sistem serupa. **Indomaret dan Alfamart** adalah dua jaringan toko serba ada terbesar di Indonesia. Meskipun fokus utama mereka adalah pada ritel dan penyediaan berbagai kebutuhan sehari-hari, mereka telah berkembang hingga mencakup berbagai layanan keuangan, termasuk pembayaran pembelian dan tagihan, dengan bertindak sebagai titik pengumpulan pembayaran OTC untuk pembayaran online. **PT Pos Indonesia**, sering disebut sebagai PT Pos, adalah perusahaan jasa pos milik negara di Indonesia. PT Pos beroperasi sebagai perusahaan milik pemerintah yang menyediakan layanan pos, kurir, dan keuangan. Pemerintah Indonesia terkadang memanfaatkan jangkauan PT Pos Indonesia dalam pelaksanaan berbagai program kesejahteraan sosial dan inisiatif inklusi keuangan. Pemanfaatan jangkauan ini termasuk pencairan subsidi dan tunjangan kepada individu yang memenuhi syarat di daerah perdesaan. **Pegadaian**, yang secara resmi dikenal sebagai PT Pegadaian (Persero), beroperasi sebagai lembaga keuangan non-bank dan bertugas memfasilitasi akses terhadap pembiayaan (seperti menyediakan layanan pegadaian dan pinjaman berbasis agunan), serta layanan tabungan emas.

**GAMBAR 10. DISTRIBUSI LAYANAN POS DAN PEMBAYARAN ONLINE PT POS DI SELURUH INDONESIA HINGGA TAHUN 2022**



**Sumber:** Informasi terkini pegadaian diperoleh dari data terkini PT Pos tahun 2023. Lokasi spesifiknya ditentukan berdasarkan alamat lengkap lembaga tersebut.

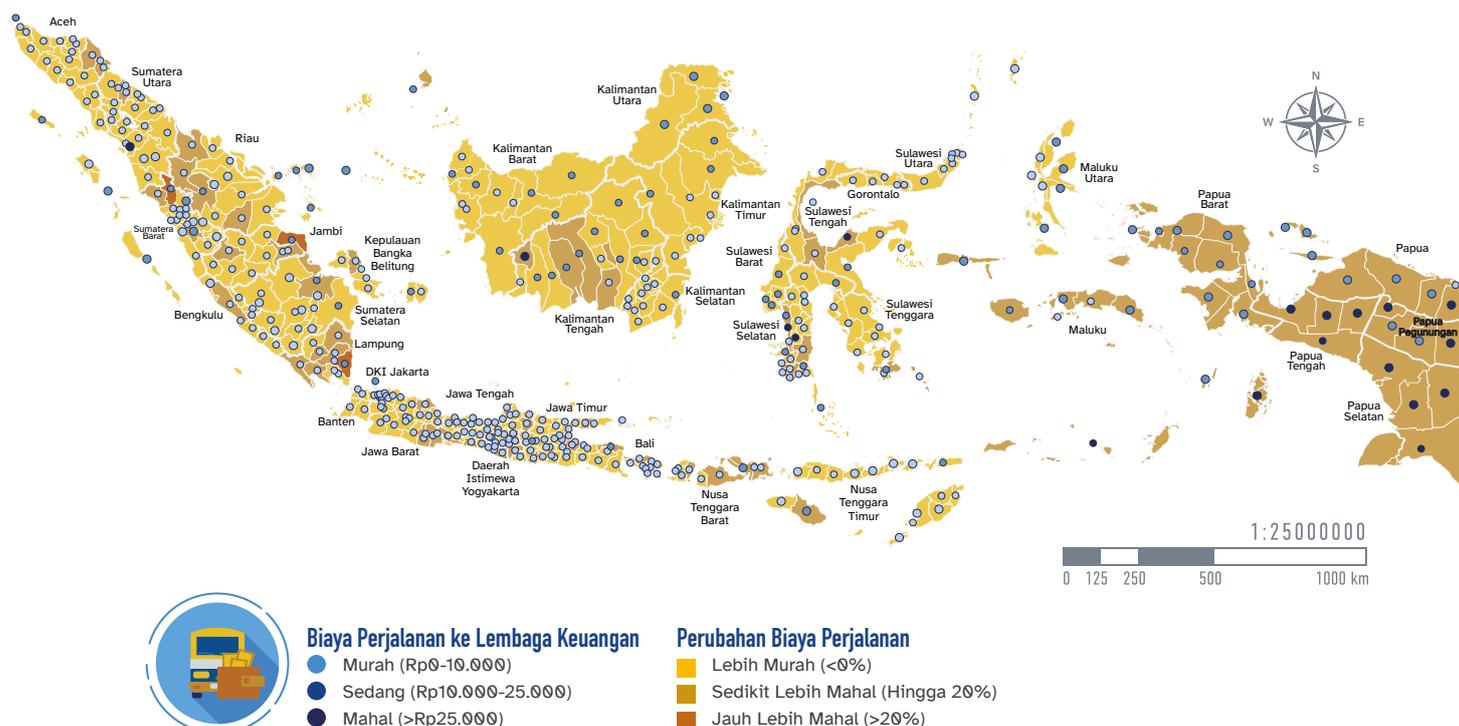
**GAMBAR 11. SEBARAN PT PEGADAIAN YANG MELAYANI JASA TABUNGAN DAN GADAI EMAS DI INDONESIA HINGGA TAHUN 2022**



**Sumber:** Data lokasi cabang Pegadaian dikumpulkan dari daftar tahun 2023 yang tersedia untuk umum. Lokasi spesifik ditentukan dengan menggunakan alamat lengkap lembaga tersebut. PT Pegadaian merupakan perusahaan penyedia jasa pegadaian milik negara yang ternama dan terbesar.

## Lampiran D: Gambar Tambahan

**GAMBAR 12. PERKIRAAN BIAYA PERJALANAN KE LEMBAGA KEUANGAN TERDEKAT TAHUN 2018–2022**



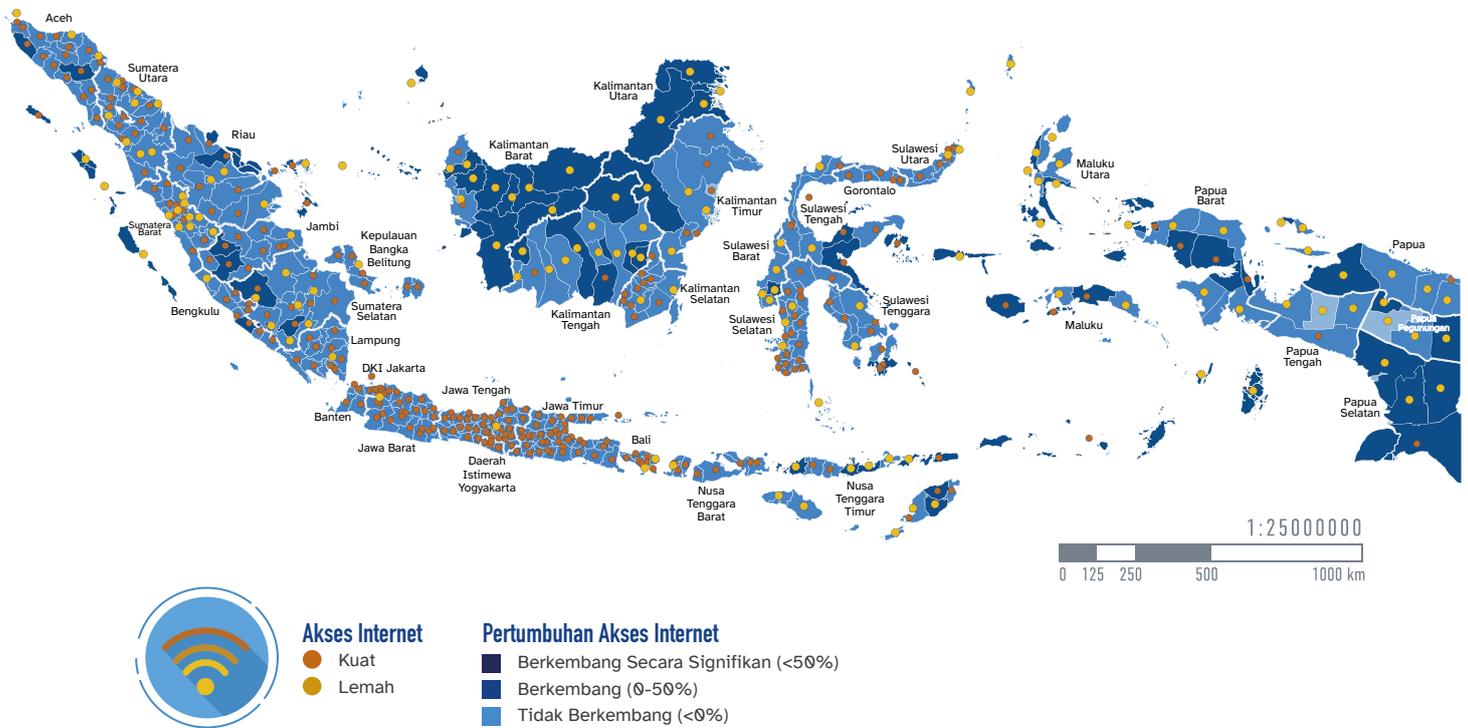
**Sumber:** Biaya perjalanan mengacu pada data Podes (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2022. Peta tersebut mengklasifikasikan biaya perjalanan menjadi tiga tingkatan: Rp0–10.000 untuk biaya perjalanan murah, Rp10.000–25.000 untuk biaya perjalanan sedang, dan >Rp25.000 untuk biaya perjalanan mahal. Perubahan biaya perjalanan (dalam persen) ditentukan dengan membandingkan data tahun 2018 dan 2022. Biaya perjalanan diperkirakan dengan menghitung jarak ke lokasi finansial dalam kilometer. Setiap kilometer kemudian dikalikan dengan Rp500 (dengan asumsi 1 liter bensin menempuh jarak 20 kilometer dan dihargai Rp10.000 per liter). Perkiraan ini didasarkan pada prakiraan harga bahan bakar, khususnya pertalite, yang paling umum digunakan, terutama di daerah perdesaan. Di beberapa wilayah perdesaan, transportasi umum yang tidak memadai, menyebabkan banyak warga menggunakan sepeda motor untuk mencapai lokasi layanan keuangan.

### Bagaimana Perempuan di Indonesia Barat dan Timur Mengakses Titik Layanan Keuangan?

Dalam konteks Pulau Saparua (Maluku Tengah) dan Rumpin (Jawa), beragamnya moda transportasi yang tersedia bagi perempuan secara signifikan memengaruhi kemampuan mereka untuk mengakses pusat keuangan dan terlibat dalam kegiatan ekonomi. Di Saparua, nelayan dan pedagang perempuan mendapatkan manfaat dari berbagai pilihan transportasi, seperti ojek dan angkot. Perjalanan multi-moda seorang perempuan pedagang ikan menjadi contoh ilustratif, yang menunjukkan bagaimana transportasi yang mudah diakses berdampak positif terhadap partisipasi ekonomi perempuan dan menciptakan skenario yang menguntungkan untuk mengakses lembaga keuangan.

Sebaliknya, di Rumpin, tingginya kepemilikan sepeda motor dan bahkan mobil di kalangan perempuan menjadi faktor utama dalam mobilitas, baik untuk pekerjaan perawatan tidak berbayar maupun untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Prevalensi kendaraan pribadi terlihat dari kurangnya transportasi umum yang dapat diandalkan, yang menunjukkan pentingnya peran pilihan transportasi yang mudah diakses dalam pemberdayaan perempuan secara ekonomi. Contohnya di daerah ini menunjukkan hubungan yang rumit antara moda transportasi, mobilitas perempuan, dan kemampuan perempuan untuk terlibat dalam layanan keuangan—dengan menekankan pentingnya solusi untuk mendorong akses keuangan inklusif.

**GAMBAR 13. TINGKAT KECEPATAN AKSES INTERNET PERIODE 2018-2022**



**Sumber:** Tingkat kecepatan akses internet mengacu pada data Podes (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun 2022. Klasifikasi akses internet kuat dan lemah mengacu pada skor akses internet di atas dan di bawah rata-rata, yang ditentukan dengan mengevaluasi berbagai tingkat akses, termasuk 4G/LTE, 3G, 2G, dan area tanpa sinyal. Perubahan kualitas akses internet (dalam persen) ditentukan dengan membandingkan data tahun 2018 dan 2022.

**GAMBAR 14. USULAN INTERVENSI KOLABORATIF DI BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN**

	Intervensi	Aktor Utama		Aktor Pendukung	Tujuan
<b>Sisi Penawaran</b>	Perkiraan dampak layanan	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Universitas	Jangka panjang
	Peningkatan kapasitas nasabah	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah setempat, penyedia e-commerce	Jangka panjang
	Meningkatkan kesesuaian produk	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil	Jangka panjang
	Mendorong penilaian kredit yang inovatif	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Otoritas Jasa Keuangan, universitas	Jangka pendek
	Menerapkan solusi digital	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Penyedia teknologi, Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jangka pendek
	Memastikan upaya mereka selaras dengan lembaga publik	Penyedia Jasa Keuangan	Bank, fintech, penyedia asuransi	Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia	Jangka pendek
<b>Sisi Permintaan</b>	Berinvestasi pada layanan publik dan infrastruktur	Pemerintah	Kementerian terkait (misalnya Kementerian Komunikasi dan Informatika, PUPR, Keuangan)	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan	Jangka pendek
	Pengembangan kebijakan inklusif dan strategi roadmap (rencana strategis) yang jelas	Pemerintah	Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil	Jangka panjang
	Pemberian insentif dan dukungan kelembagaan	Pemerintah	Kementerian terkait (misalnya Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian)	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan	Jangka menengah
	Memfasilitasi kolaborasi antarpemangku kepentingan	Pemerintah	Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan, Organisasi Masyarakat Sipil, universitas	Jangka panjang
	Mempromosikan pendidikan keuangan	Pemerintah	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil	Jangka panjang
	Mendukung pengumpulan data dengan pemilahan gender	Pemerintah	Badan Pusat Statistik	Pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Penyedia Jasa Keuangan, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil	Jangka pendek
	Pengembangan model layanan keuangan	Lembaga sosial	Universitas	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil, Otoritas Jasa Keuangan	Jangka panjang
	Memperluas advokasi isu-isu seperti adaptasi perubahan iklim, asuransi iklim, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan banyak lagi	Lembaga sosial	Organisasi Masyarakat Sipil	Pemerintah daerah, Penyedia Jasa Keuangan, universitas, Organisasi Masyarakat Sipil, Otoritas Jasa Keuangan	Jangka pendek



Women's World Banking

 [Women's World Banking](#)  [@womensworldbnkg](#)

 [Women's World Banking](#)  [@womensworldbnkg](#)

[www.womensworldbanking.org](http://www.womensworldbanking.org)